

ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KREDIT UNTUK MENINGKATKAN PROFITABILITAS

(Studi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dau Kusumadjaja Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

**ELY CINTANA DEWI
NIM. 105030207111068**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI KEUANGAN
2014**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Efektifitas Kebijakan Kredit untuk Meningkatkan Profitabilitas (Studi pada PT. Bank Perkreditan Dau Kusmadjaja Malang)

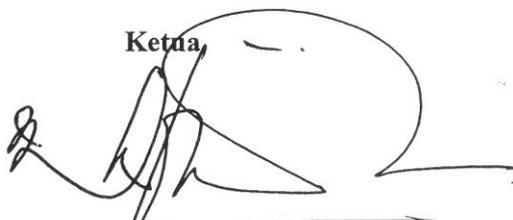
Nama : Ely Cintana Dewi

Nim : 105030207111068

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Malang, Juli 2014

Komisi Pembimbing**Ketua****Dr. Drs. Moch Dzulkirom. AR**

195311221987031001

Anggota**Dra. Zahro ZA, M.Si**

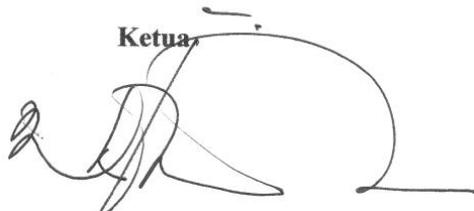
195912021984032001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah di pertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 11 Agustus 2014
Jam : 11.00 – 12.00
Skripsi atas nama : Ely Cintana Dewi
Judul : Analisis Efektifitas Kebijakan Kredit untuk Meningkatkan Profitabilitas (Studi pada PT. Bank Perkreditan Dau Kusmadjaja Malang)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI**Ketua**

Dr. Moch Dzulkrirom. AR
195311221987031001

Anggota

Dra. Zahro ZA, M.Si
195912021984032001

Anggota

Drs. Dwi Atmanto M.Si
NIP. 19551102 198303 1 002

Anggota

Dra. MG. Wi Endang NP, M.Si
NIP. 19620422 198701 2001



MOTTO

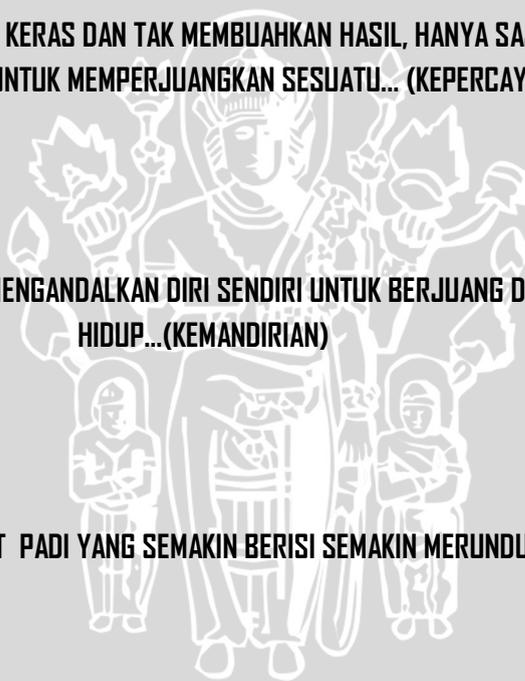
ORANG TUAKU ADALAH SURGAKU.. (PRINSIP)

SESUATU YANG SULIT DIPERJUANGKAN ADALAH AWAL DARI KESUKSESAN DAN KEBAHAGIAAN.. (KEYAKINAN)

TIDAK ADA USAHA YANG BEGITU KERAS DAN TAK MEMBUAHKAN HASIL, HANYA SAJA PERCAYA KEPADA ALLAH DAN POTENSI DIRIMU UNTUK MEMPERJUANGKAN SESUATU... (KEPERCAYAAN DAN IKHTIAR)

KADANG – KADANG KITA HARUS MEGANDALKAN DIRI SENDIRI UNTUK BERJUANG DAN MEMPERTAHAKAN HIDUP...(KEMANDIRIAN)

JADILAH SESEORANG IBARAT PADI YANG SEMAKIN BERISI SEMAKIN MERUNDUK (KESUKSESAN)



RINGKASAN

Ely Cintana Dewi.2014. Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit untuk Meningkatkan Profitabilitas (Studi pada Bank Perkreditan Rakyat Dau Kusumadjaja Malang). Dr. Drs Moch Dzulkirom AR. Dra. Zahroh ZA M.Si
116+xiii

Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Sektor perbankan merupakan sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal guna mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas- fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan kepada masyarakat. Fasilitas tersebut dapat berupa pemberian fasilitas kredit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan kredit yang efektif untuk meningkatkan profitabilitas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau objek yang terjadi di masa sekarang. Penelitian bertempat pada BPR Dau Kusumadjaja Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan variabel pengukuran efektifitas kebijakan kredit yaitu Efektivitas, *Loans deposit Ratio*, *Capital Adequacy ratio* dan Profitabilitas antara lain, *Return Of Asset*, *Return Of Equity*, BOPO, *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*, *Net Income total Assset*, *Rate return on Loans*,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kredit pada BPR Dau Kusumadjaja belum efektif. Hal ini terbukti dengan penurunan perhitungan efektivitas keuangan sebesar 56,5% yang berarti belum efektif. Pada perhitungan LDR mencapai angka 69% pada tahun 2013 hal ini berarti masih berada dibawah Standar Bank Indonesia yaitu antara 85%-110%. Kemudian nilai *Capital Adequacy Ratio* sebesar 8,8% pada tahun 2011 sebesar 2012 6,8%, dan 8,3 pada tahun 2013.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kenaikan *Loan Deposit Ratio* dapat meningkatkan nilai ROA dan menurunkan BOPO serta diikuti dengan sisi manajemen yang lainnya seperti ROE, GPM, NPM, *Net Income total Assset*, dan *Rate return on Loans*. Kebijakan kredit yang efektif dapat meningkatkan profitabilitas dengan menggunakan pendekatan regulasi atau standar peraturan BI. Kebijakan kredit yang efektif dapat meningkatkan profitabilitas dengan cara meningkatkan ekspansi kredit melalui perhitungan *Loans Deposite Ratio* dan penambahan modal melalui perluasan pendapatan melalui deposito dan tabungan melalui perhitungan *Capital Adequacy Ratio*.

Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan Kredit, Profitabilitas

SUMMARY

Ely Cintana Dewi.2014. Analysis Effectiveness Credit Policy to Improve profitability (Study in Bank BPR Dau Kusumadjaja Malang) Dr. Drs Moch Dzulkirom AR. Dra. Zahroh ZA M.Si 116+xvi

Banking have an important role in advancing the economy of a country. The banking sector to be developed and used maximally to implement even distribution of public revenues especially through distributing facilities given by the bank to the public. This is include the provision of credit facilities. The aim of this research is to find out the policy of credit effective to improve profitability.

The type of research used is deskriptive method. This study aimed to describe an fenomena object or happening in the present. Research on BPR Dau Kusumadjaja is unfortunate. The research method used is descriptive analysis method with variable credit policy effectiveness measurement of effectiveness, Loans deposit Ratio, Capital Adequacy ratio dan Profitabilitas antara lain, Return Of Asset, Return Of Equity, BOPO, Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Net Income total Assset, Rate return on Loans.

the result showed tha BPR credit policy on Dau Kusumadjaja not effective. It was proven by the effectiveness financial calculation of 56.5% which means not effective. On a calculation LDR reach a level of 69% in 2013 this would mean still be under standart Bank Indonesia which that of 85% - 110%. Then the value of Capital Adequacy Ratio by 8.8% in 2011, 6.8% in 2012 and 8.3% in 2013.

Conclusion of this research is to Increase Loan Deposit Ratio can increase the value of ROA and lowering BOPO and followed by the other management such as ROE, GPM, NPM, Net Income total Assset, and Rate of return on Loans. Credit policies that can effectively improve profitability by using the regulatory standards or regulatory approach to BI. Effective credit policy can increase profitability by increasing credit expansion through calculation Loans Ratio and Deposite capital increase via expansion of revenue through deposits and savings through the calculation of Capital Adequacy Ratio.

Keyword : Effectivennes, Credit Policy, Profitability

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi inspirasi bagi penulis untuk tetap berjuang menjalani kehidupan dalam keridho'an nikmat Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit untuk meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Bank Perkreditan Dau Kusumadjaja Malang).**”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, pengarahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Mohammad Iqbal, S.Sos. M.IB, DBA, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Brawijaya

4. Bapak Dr. Wilopo, M.AB, selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Bapak Rizki Yudhi Dewantara, S.AP, M.AP, selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
6. Bapak Dr. Drs, Moch Dzulkirom M.Si selaku dosen pembimbing I yang senantiasa membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Zahroh ZA. M.Si selaku dosen pembimbing II yang senantiasa membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya atas segala ilmu yang bermanfaat dan pengalaman berharga yang diberikan.
9. Ibu Endang serta seluruh karyawan BPR Dau Kusumadjaja Malang.
10. Kepada kedua orang tua tercinta, sumber inspirasi dan motivasi terbesar penulis, Ayah Dwi Satrio dan Mama Rahayu Harintosasi atas segenap dukungan secara moril maupun materiil, kesabaran, dan doa tulus ikhlas yang mengiringi hingga akhir kelulusan ini.
11. Kepada kakakku Prahsetya Danny Pahlawan dan adikku A'Toibi Family yang selalu memberikan semangat dan dukungan moril kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada teman – teman seperjuangan angkatan 2010 khususnya Dipo, Vio, Rila, Niluh, Nita yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 13. Keluarga Besar Administration Music Club, Mas Endheey, Mbak Irene, Mas Lipur, Mbak Ndara, Mas Sony, Mas Gendheng, Mbak Sovie, Mas Mirza, Mas Bram, Abangku Ucok, Mas Connor, Mas Nanda, Mas Sufa, Mas Adul, Tamtam, Aya', Fajri, Elsi, Jujul, Rico, Ives, Ubay, Cumi, Dio, Lanang atas canda tawanya dan menjadi teman ngobrol yang baik bagi penulis.
 14. Terimakasih kepada Homeband FIA Brawijaya Mas keceng, Dek nanda, Nabila, Fitron, Pacarku, Dhimas, Bonbon yang memberikan pengalaman berharga bagi kehidupan penulis dan perjuangan suka duka. Akhirnya Kita Menang Kharismaaa Brawijaya Jazz Festival 2013. Big Hug My HomebandFIA.
 15. Special for you My Septian Syah Purba pacar seperjuangan suka duka. Akhirnya kita Sarjana.
- Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2014

Penulis,

DAFTAR ISI

MOTTO	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Bank.....	10
1. Pengertian dan Fungsi Bank	10
2. Jenis dan Kegiatan Bank.....	11
B. Kredit	15
1. Pengertian Kredit	15
2. Unsur-unsur Kredit	16
3. Tujuan dan Fungsi Kredit	17
4. Jenis Kredit	18
5. Prosedur Umum Pemberian Kredit.....	20
6. Kebijakan Perkreditan Bank	23
7. Pengendalian Kredit Bank	25
8. Pendekatan dalam Perencanaan Kredit.....	30
C. Kebijakan Umum Perkreditan Bank	31
1. Prinsip Kehati - hatian	31
2. Organisasi dan Manajemen Kredit.....	34
3. Kebijaksanaan Persetujuan Kredit	36
4. Dokumentasi dan Administrasi.....	37
5. Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	37
D. Efektivitas Kebijakan Kredit.....	39
1. Pengertian Efektivitas	39
2. Efektivitas Kebijakan Kredit.....	39
3. Pengukuran Efektivitas	40



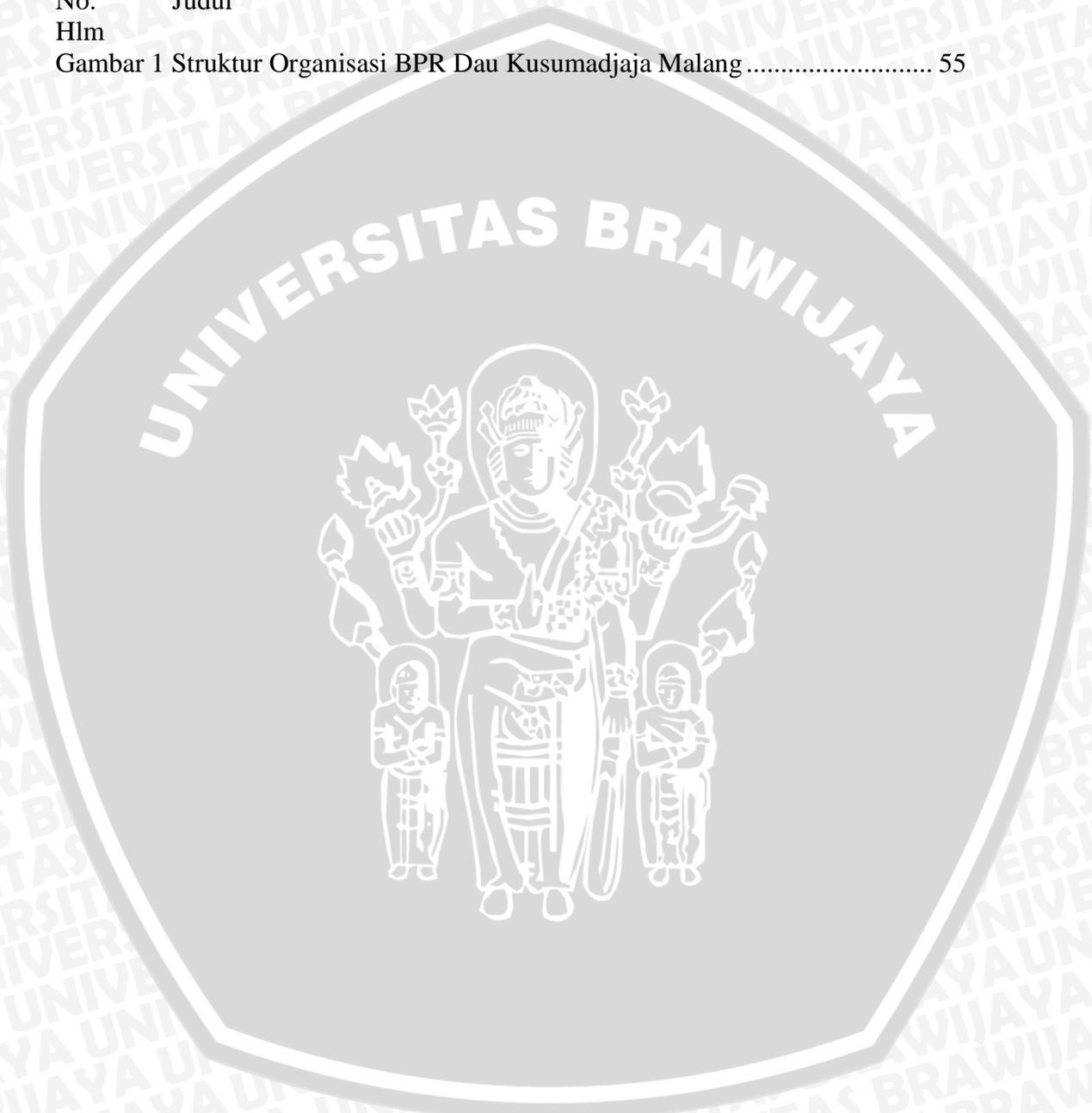
E. Analisis Kebijakan Pemberian Kredit dan Rasio Keuangan.....	41
1. Ketentuan Bank Indonesia Berkenaan dengan Prinsip Kehati-hatian Pemberian Kredit	41
a. Menentukan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)	41
b. Rasio Kredit terhadap <i>Loans Deposit Ratio</i>)	41
c. Rasio kecukupan modal atau <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> atau kewajiban Penyediaan Modal Minimum	42 d.
Probabilitas	43
2. Peraturan Bank Indonesia	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Fokus Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian	47
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Instrumen Penelitian.....	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Perusahaan	52
1. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat Dau Kusumadjaja	52
2. Visi Misi dan Motto PT. BPR Dau Kusumadjaja	53
3. Struktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat Dau Kusumadjaja	54
4. Jenis Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dau Kusumadjaja	58
B. Penyajian Data	62
1. Data Realisasi Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dau Kusumadjaja	62
2. Data Kolektabilitas Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dau Kusumadjaja	62
3. Data Jumlah Kredit Bermasalah	63
4. Prosedur Umum Pemberian Kredit.....	63
5. Kebijakan Perkreditan Bank BPR Dau Kusumadjaja.....	74
C. Analisa dan Interpretasi Data.....	84
1. Perhitungan Rasio Keuangan	84
2. Analisa kebijakan Kredit.....	107
BAB V KESIMPULAN	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hlm
Tabel 1	Data Statistik Tingkat Pendidikan BPR Dau Kusumadjaja	54
Tabel 2	Data Statistik SDM BPR Dau Kusumadjaja	54
Tabel 3	Data realisasi Kredit	62
Tabel 4	Data Kolektabilitas Kredit	62
Tabel 5	Data Jumlah Kredit Bermasalah	63
Tabel 6	Tabel perhitungan Efektivitas	85
Tabel 7	Tabel perhitungan <i>Loan Deposite Ratio</i>	86
Tabel 8	Tabel perhitungan Aktiva tertimbang Menurut Rasio tahun 2011	87
Tabel 9	Tabel perhitungan Aktiva tertimbang Menurut Rasio tahun 2012	88
Tabel 10	Tabel perhitungan Aktiva tertimbang Menurut Rasio tahun 2013	89
Tabel 11	Tabel perhitungan <i>Return Of Assets</i>	91
Tabel 12	Tabel perhitungan BOPO	91
Tabel 13	Tabel perhitungan <i>Net Profit Margin</i>	92
Tabel 14	Tabel perhitungan <i>Return Of Equity</i>	93
Tabel 15	Tabel perhitungan <i>Gross Profit margin</i>	95
Tabel 16	Tabel perhitungan <i>Net Incone Total Asset</i>	96
Tabel 17	Tabel perhitungan <i>Rate return on Loans</i>	97
Tabel 18	Tabel perhitungan Batas Maksimum pemberian Kredit	100
Tabel 19	Tabel perhitungan Tambahan Ekspansi Kredit	101
Tabel 20	Tabel perhitungan Pembaharuan Kredit Yang diusulkan	102
Tabel 21	Tabel perhitungan Tambahan Modal Bank	103
Tabel 22	Tabel perhitungan <i>Return Of Equity</i>	104
Tabel 23	Tabel perhitungan usulan Biaya Operasional pendapatan Operasional	105
Tabel 24	Tabel perhitungan Return Of Asset	106

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul
Hlm	
	Gambar 1 Struktur Organisasi BPR Dau Kusumadaja Malang 55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir seluruh sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. “Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi menghimpun dana, bank sering pula disebut sebagai lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan salah satu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah” (Siamat, 2005:8)

Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dan aktivitasnya pasti berhubungan dengan masalah keuangan.

Sektor perbankan merupakan sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal guna mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas - fasilitas yang diberikan oleh

pihak perbankan kepada masyarakat. Fasilitas tersebut dapat berupa pemberian fasilitas kredit, baik kredit modal kerja, kredit investasi, kredit pensiun dan jenis kredit lainnya.

Menurut (Ariati : 2006), “Kredit adalah pemindahan atau pertukaran sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama di masa yang akan datang”. Kredit merupakan kegiatan operasional terpenting dalam dunia perbankan . Dimana perkreditan memiliki aset terbesar jika dibandingkan dengan kegiatan operasional bank yang lain. Meskipun perkreditan merupakan sumber utama penghasilan bank, namun resiko kerugian sebagian besar bersumber pada sisi kredit tersebut. Maka dari itu, setiap proses pemberian kredit membutuhkan kebijakan kredit yang tepat agar dapat meminimalisir resiko kerugian.

Kebijakan kredit berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan perkreditan bank. Lingkup pemberian kredit mencakup banyak aspek dan mengandung resiko yang bervariasi baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Hasibuan (2004:92), “Kebijaksanaan perkreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar. Program perkreditan harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian. Yuridis artinya program perkreditan harus sesuai dengan undang-undang perbankan dan ketetapan Bank Indonesia. Ekonomis artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang disalurkan. Kehati-hatian artinya besar plafond kredit (*legal lending limit*=BMPK)

harus ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C, 7P, dan 3R dari setiap calon peminjam” (Ariati:2006).

Kebijaksanaan kreditsangat dibutuhkan karena kegiatan kredit merupakan kegiatan utama perbankan yang memiliki risiko yang besar, untuk menghindari resiko tersebut, maka bank perlu untuk melakukan efektifitas dalam penyaluran kredit. Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dan output. Outcome merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan target dengan realisasinya dan persentase tingkat pencapaiannya (Mardiasmo, 2006:123).

Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, dalam memberikan kredit diperlukan pedoman yang disebut kebijakan kredit agar tujuan perusahaan berupa profitabilitas baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat tercapai sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Melalui efektifnya kebijakan kredit dapat dijadikan acuan ukuran sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pengukuran efektifitas kebijakan pada sisi perbankan didasarkan pada pencapaian income dan outcome atau target dan realisasi. Melalui

pengukuran tersebut dapat diketahui seberapa jauh perusahaan dapat mencapai target penyaluran kredit yang ditetapkan sehingga dapat tercipta efektifitas kebijakan kredit. Tujuan yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan perbankan salah satunya melalui kebijakan kredit adalah tercapainya profitabilitas.

“Profitabilitas merupakan hasil akhir dari keseluruhan kebijakan dan keputusan yang dipilih oleh manajemen organisasi bisnis. Seluruh kebijakan apapun yang ada dalam organisasi jika berjalan baik dan berdampak positif akan menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien, sehingga akan menghasilkan tingkat keuntungan perusahaan yang memuaskan” (Kusnadi dkk,2002:117).

Profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahaan dalam hal kapabilitas dan motivasi dari manajemen. Profitabilitas merupakan suatu alat pengendalian bagi manajemen yang dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target, budget, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan dasar pengambilan keputusan.

Profitabilitas merupakan hasil akhir aktifitas perbankan. Proses pencapaian profitabilitas pada suatu bank tak lepas dari penyaluran produk – produk andalan yang dimiliki oleh bank. Produk andalan bank adalah kegiatan perkreditan. Begitu pula dengan Bank Perkreditan Rakyat dimana bank ini adalah bank yang bergerak dalam sektor kredit yang memenuhi harkat hidup orang banyak melalui kegiatan kredit. Inti dari kegiatan Bank Perkreditan Rakyat adalah kegiatan penyaluran kredit. Kredit yang disalurkan Bank Perkreditan rakyat sangat berguna bagi

seluruh masyarakat untuk mendapatkan modal untuk keberlangsungan kegiatan usahanya.

Sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang telah berdiri selama 18 tahun, PT. BPR Dau Kusumadjaja Malang memiliki kegiatan usaha yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan deposito berjangka, sertifikat tabungan dan penyaluran dana dimana penyaluran dana terbagi dalam dua komponen kredit yaitu, kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Pada kegiatan perkreditannya Bank BPR Dau Kusumadjaja menghasilkan profitabilitas. Berikut data Rasio Profitabilitas PT. Bank BPR Dau Kusumadjaja Malang periode 2011- 2013 :

Data Profitabilitas PT. BPR Dau Kusumadjaja Tahun 2011-2013

Tahun	ROA	ROE	BOPO	NPM	GPM	NITA	RRoL
2011	(6,5%)	(19,38%)	133%	85,68%	33,7%	(6,52%)	24%
2012	(3,2%)	(10,16%)	124%	90,32%	14,8%	(3,25%)	33,4%
2013	(1,9%)	(8,44%)	114%	78%	24%	(1,99%)	15,9%

(Sumber: Bank BPR Dau Kusumadjaja)

Melalui data diatas Bank BPR Dau Kusumadjaja Malang dalam aktivitasnya mengalami fluktuasi pendapatan atau profit setiap tahunnya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi profitabilitas cukup banyak dan salah satunya yang berkaitan dengan sektor manajemen kredit. Menurut Abdilah (2001: 124), Beberapa rasio yang digunakan dalam melakukan perhitungan profitabilitas, diantaranya *Return of Equity* (ROE) untuk mengetahui kemampuan modal sendiri bank dalam memperoleh keuntungan bersih bank, *Net Profit Margin* (NPM) untuk mengukur seberapa jauh kontribusi pendapatan operasional dalam memperoleh laba bersih

perbankan, dan *Gross Profit Margin* (GPM) untuk menghitung laba operasi melalui pendapatan operasi yang dihasilkan. *Net Income Total Asset* untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui penggunaan modal sendiri. *Rate Return on Loans* untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola profitabilitas perusahaan. Kelima rasio tersebut sudah cukup mengindikasikan profitabilitas yang dicapai PT. Bank Perkreditan Rakyat Dau Kusumadaja Malang.

Pemberian Kredit merupakan aktivitas terbesar dari Bank BPR Dau Kusumadaja Malang, oleh sebab itu penerimaan pendapatan dari sektor ini sangat berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Keberhasilan bank dalam meningkatkan profitabilitasnya tidak dapat terlepas dari kebijakan kredit yang telah dimiliki bank apakah telah dilaksanakan dengan efektif ataukah belum. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul :

**“Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit untuk Meningkatkan Profitabilitas”
(Studi pada PT. Bank BPR Dau Kusumadaja Malang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kebijakan kredit yang diterapkan di PT. Bank BPR Dau Kusumadaja Malang ?
2. Apakah kebijakan kredit yang efektif yang dapat meningkatkan profitabilitas di PT. Bank BPR Dau Kusumadaja Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Mendeskripsikan kebijakan kredit yang diterapkan di PT. Bank BPR Dau Kusumadjaja Malang.
2. Mengetahui efektifitas kebijakan kredit yang efektif sehingga dapat meningkatkan profitabilitas di PT. Bank BPR Dau Kusumadjaja Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi akademis
 - a) Sebagai kajian keilmuan, selama hal ini dalam kajian Ilmu Administrasi Bisnis.
 - b) Dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang mengangkat tema yang sama.
2. Kontribusi Praktis
 - a) Sebagai wacana bagi bank guna mengetahui bagaimana kebijakan kredit yang dapat meningkatkan profitabilitas bank.
 - b) Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat rencana kebijakan di bidang kredit.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama penulisan dan penelitian ini maka sistematika pembahasan yang direncanakan adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar isi dari latar belakang perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang berisi teori – teori yang diambil dari pendapat para ahli yang terkait dengan pembahasan dari penelitian ini, yaitu masalah efektivitas kebijakan kredit untuk meningkatkan profitabilitas. Adapun teori – teori yang dibahas meliputi : bank, kredit, kebijakan kredit, efektivitas kebijakan kredit, analisis laporan keuangan dan profitabilitas.

BAB III : METODE PENELITIAN

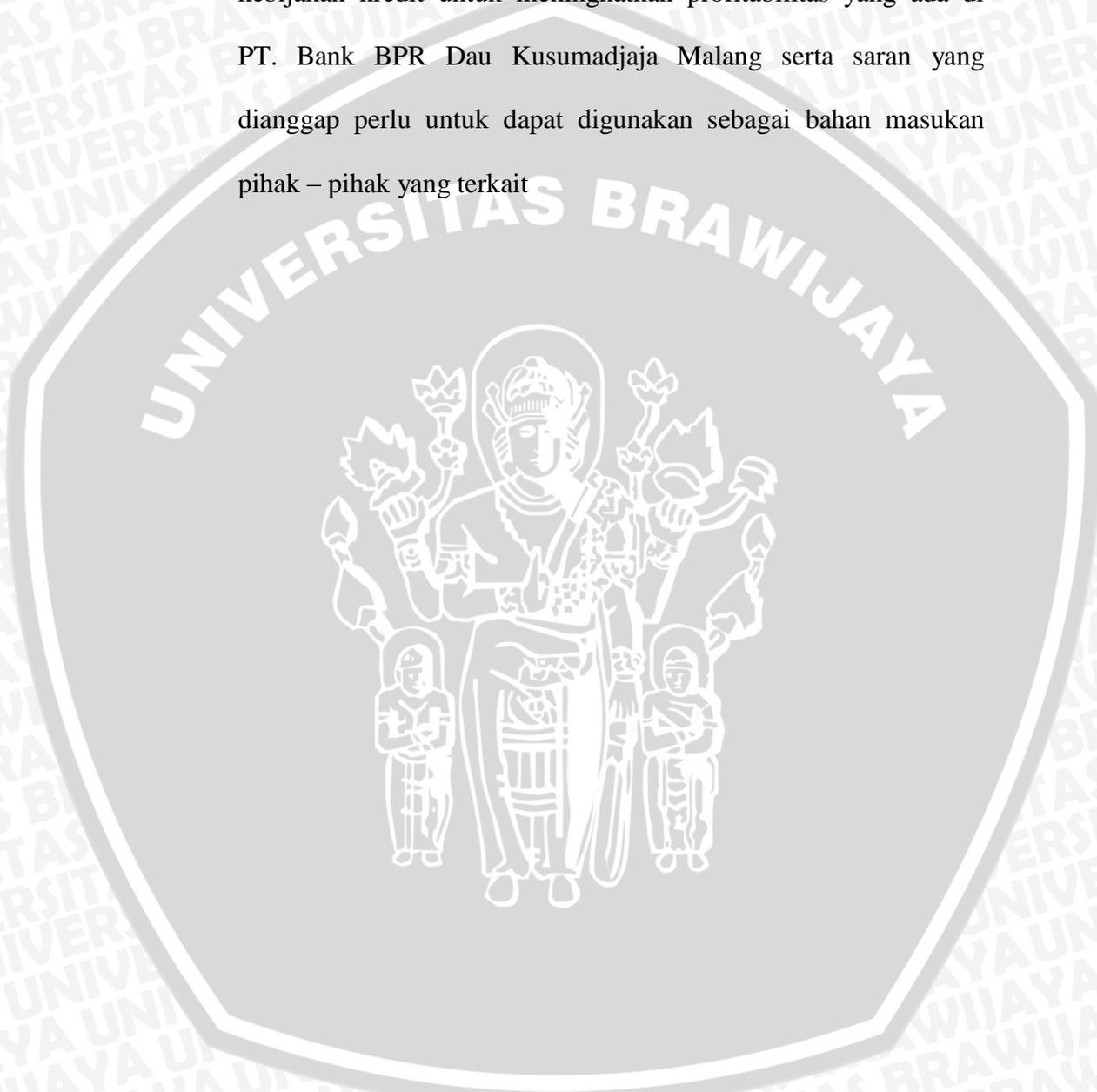
Menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang mencakup jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang gambaran umum bank, penyajian data serta analisis dan interpretasi data yang diperoleh dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Cabang Malang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan efektivitas kebijakan kredit untuk meningkatkan profitabilitas yang ada di PT. Bank BPR Dau Kusumadaja Malang serta saran yang dianggap perlu untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan pihak – pihak yang terkait



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank

1. Pengertian dan Fungsi Bank

Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 definisi “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan menurut Kasmir (2012:3), menjelaskan bahwa “bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat, serta memberikan jasa – jasa bank lainnya”. Sedangkan menurut Hasibuan (2004:2) “bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk *asset* keuangan (*financial asset*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”. Selain itu bank adalah pencipta uang dimaksudkan bahwa bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal.

Berdasarkan definisi bank tersebut, menurut Kasmir (2012:4) bank memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Menghimpun Dana (Simpanan)

Menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposit. Jenis simpanan yang dapat dipilih masyarakat

adalah simpanan giro, tabungan sertifikat deposito serta deposito berjangka dimana masing – masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan sendiri. Kegiatan menghimpun dana ini sering disebut *funding*.

b. Menyalurkan kredit

Adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan istilah *lending*.

c. Jasa Bank Lainnya

Jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa – jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menyalurkan dan menghimpun dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain jasa setoran, jasa pembayaran, jasa pengiriman uang (*transfer*), jasa penagihan (*inkaso*), jasa kliring, jasa penjualan mata uang asing (*valas*), dan sebagainya.

2. Jenis dan Kegiatan Bank

Menurut Kasmir (2012:20-25) jenis perbankan dapat ditinjau dalam berbagai segi yaitu :

a. Dilihat dari fungsinya

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan yang usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa – jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dapat dilihat dari segi kepemilikannya adalah:

1. Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.

2. Bank Milik Swasta Nasional (BUMN)

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya swasta pula.

3. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri. Baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Kepemilikannya jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri)

5. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

c. Dilihat dari segi status

1. Bank devisa

Yaitu bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *traveller cheque*, pembukaan dan pembiayaan *Letter of credit* (L/C) dan transaksi luar

negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan.

2. Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank Non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas – batas suatu negara.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

1. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Bank yang dalam mencari keuntungannya menggunakan dua metode yaitu :

- a. Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *Spread based*.
- b. Untuk jasa – jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya – biaya dalam nominal atau prosentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya

provisi, sewa, iuran, dan biaya- biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *Fee based*.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Penentuan harga bank yang berdasarkan prinsip syariah terhadap produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan cara:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtinah*)

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut taswan (2008:215) pengertian kredit adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu bertujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Menurut Sudirman (2000:48) “Kredit adalah penyediaan sejumlah uang bank atau bentuk yang lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak debitur dan mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan, bahwa pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing – masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

2. Unsur – Unsur Kredit

Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan adalah hal yang sangat mendasar yang menciptakan kesepakatan antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, baik dalam jangka waktu peminjaman sampai masa pengembalian kredit serta balas jasa yang diperoleh, maka menurut Kasmir (2012:114-115) unsur – unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar – benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian, penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.

b. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing – masing.

c. **Jangka Waktu**

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang.

d. **Risiko**

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya /macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit, semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak disengaja.

e. **Balas Jasa**

Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan kredit menurut Kasmir (2012:116-117) antara lain :

- a. Mencari keuntungan, tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sehingga balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha dari nasabah, tujuan lainnya untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama – sama diuntungkan.
- c. Membantu pemerintah, banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor, seperti penerma pajak, membuka kesempatan kerja, menghemat devisa negara, dan meningkatkan devisa negara.

Dari ketiga tujuan kredit diatas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai tujuan kredit dalam membantu perekonomian negara. Dengan demikian tujuan kredit adalah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan dan untuk mensejahterakan rakyat. Disamping tujuan diatas, terdapat juga fungsi dari suatu fasilitas kredit. Fungsi tersebut antara lain:

Menurut Muchdarsya Sinugan (2000:207), fungsi kredit sebagai berikut : “Dimana fungsi kredit adalah untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, untuk meningkatkan daya peredaran dan lalu lintas uang, sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat dan, untuk meningkatkan penerapan pendapatan, untuk meningkatkan hubungan internasional”.

Adapun menurut fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian menurut Kasmir (2012:118-119), adalah “untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, untuk meningkatkan daya guna barang, untuk meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, untuk meningkatkan kegairahan berusaha, untuk meningkatkan penerapan pendapatan dan untuk meningkatkan hubungan internasional”.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa fungsi kredit terdiri dari meningkatkan daya guna dan barang, peredaran dan lalu lintas uang, sebagai stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan berusaha, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan hubungan internasional. Hal ini merupakan fungsi penggunaan kredit bagi masyarakat.

4. Jenis Kredit

Menurut Hasibuan (2004:88), “jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang dilakukan, yaitu berdasarkan tujuan kegunaannya, jangka waktu, macam, sektor perekonomian, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan”.

a. Berdasarkan Tujuan Kegunaannya

1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan bersama keluarganya. Kredit ini tidak produktif.
2. Kredit modal kerja (kredit perdagangan), yaitu kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini produktif.
3. Kredit investasi, yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya kredit ini diberikan *grace period*, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain.

- b. Berdasarkan Jangka Waktu
 1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
 2. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
 3. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.
- c. Berdasarkan Macamnya
 1. Kredit aksep, yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit (L3/BMPK)-nya.
 2. Kredit penjual, yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli. Artinya barang telah diterima, pembayaran kemudian.
 3. Kredit pembeli, yaitu pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka.
- d. Berdasarkan Sektor Perekonomian
 1. Kredit pertanian, yaitu kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.
 2. Kredit perindustrian, yaitu kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
 3. Kredit pertambangan, yaitu kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
 4. Kredit ekspor-impor, yaitu kredit yang diberikan kepada eksportir dan/atau importir beraneka barang.
 5. Kredit koperasi, yaitu kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
 6. Kredit profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi, seperti dokter dan guru
- e. Berdasarkan Agunan/Jaminan
 1. Kredit agunan orang, yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
 2. Kredit agunan efek, yaitu kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
 3. Kredit agunan barang, yaitu kredit yang diberikan dengan agunan barang bergerak, barang tidak bergerak, dan logam mulia.
 4. Kredit agunan dokumen, yaitu kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti *letter of credit* (L/C).
- f. Berdasarkan Golongan Ekonomi
 1. Golongan ekonomi lemah, yaitu kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lain-lain.
 2. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
- g. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan
 1. Kredit rekening koran (kredit perdagangan), yaitu kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan;

penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening koran baru dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.

2. Kredit berjangka, yaitu kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

5. Prosedur Umum Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012:95), secara umum prosedur pemberian kredit oleh bank adalah:

a. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank, maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya berisi keterangan tentang:

- 1) Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.
- 2) Tujuan pengambilan kredit, harus jelas tujuannya.
- 3) Besarnya kredit dan jangka waktu.
- 4) Cara pemohon mengembalikan kredit.
- 5) Jaminan kredit.

Selanjutnya proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

1. Akte Pendirian Perusahaan
2. KTP para pengurus dan pemohon kredit
3. Tanda Daftar Perusahaan
4. NPWP
5. Neraca dan laporan rugi/laba 3 tahun terakhir
6. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan
7. Daftar penghasilan bagi perseorangan
8. Kartu Keluarga bagi perseorangan

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang telah diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapi. Apabila sampai

batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian berkas-berkas yang ada. Jika asli dan benar maka pihak bank mencoba mengkalkulasi menggunakan perhitungan terhadap angka-angka di laporan keuangan dengan berbagai rasio keuangan apakah jumlah kredit yang diminta relevan sesuai kemampuan nasabah untuk membayar.

c. Penilaian Kelayakan Kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan Studi Kelayakan. Dalam Studi Kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak, perlu dipertimbangkan lebih jauh.

Aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

1) Aspek Hukum

Tujuan penilaian aspek hukum adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit dan mencegah masalah seperti dokumen palsu atau sedang dalam sengketa. Penilaian aspek hukum meliputi:

- a) Akte Notaris
- b) KTP
- c) Tanda Daftar Perusahaan
- d) Ijin Usaha
- e) Ijin Mendirikan Bangunan
- f) NPWP
- g) Sertifikat-sertifikat tanah atau surat berharga
- h) BPKB

2) Aspek Pasar dan Pemasaran

Merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Dalam aspek ini dinilai prospek usaha sekarang dan masa mendatang.

3) Aspek Keuangan

Untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari Laporan Keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi/Laba 3 tahun terakhir. Analisa keuangan meliputi analisa rasio likuiditas, *leverage*, aktivitas, profitabilitas, dan analisis pulang pokok.

4) Aspek Teknis/Operasi

Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha, kelengkapan sarana dan prasarana, dan *lay out* gedung dan ruangan.

5) Aspek Manajemen

Untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimiliki.

6) Aspek Ekonomi Sosial

Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas baik ekonomi maupun sosial.

7) Aspek AMDAL

Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air, dan udara sekitarnya.

d. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti keinginan bank. Wawancara juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah sebenarnya. Sebaiknya wawancara dibuat senyaman mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

e. Peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara, maka langkah selanjutnya dilakukan peninjauan ke lokasi objek kredit dan hasil peninjauan dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Saat melakukan peninjauan hendaknya tidak memberi tahu nasabah sehingga apa yang ditemui di lapangan adalah kondisi sebenarnya. Tujuannya untuk memastikan bahwa objek kredit benar-benar ada dan sesuai dengan yang tertulis pada proposal.

f. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dan wawancara kedua. Wawancara kedua merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangannya saat setelah dilakukan peninjauan lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan saat peninjauan apakah ada kesesuaian dan mengandung kebenaran.

g. Keputusan Kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keasliannya serta yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit, maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit.

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak diberikan atau tidak. Jika layak, maka dipersiapkan administrasinya yang mencakup:

1. Akad kredit yang akan ditandatangani
2. Jumlah uang yang diterima
3. Jangka waktu kredit
4. Biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai alasan masing-masing.

h. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

i. Realisasi Kredit

Setelah akad kredit ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.

6. Kebijakan Umum Perkreditan Bank

1) Pengertian Kebijakan Kredit

Menurut Hasibuan (2004:92), “kebijakan kredit adalah kebijakan yang harus diprogram dengan baik dan benar dimana berlandaskan asas yuridis, ekonomis dan kehati – hatian”. *Yuridis* berarti program perkreditan harus sesuai dengan undang – undang perbankan dan ketentuan Bank Indonesia, *Ekonomis* berarti menetapkan rentabilitas yang ingin di capai dan tingkat bunga kredit yang disalurkan, *Kehati –hatian* berarti besar plafond kredit (*legal lending limit* =BMPK) harus ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C, 7P, dan 3R dari setiap calon pemimjam.

2) Kebijakan Perkreditan Bank

Pada penetapan kebijaksanaan kreditnya, bank memiliki pertimbangan – pertimbangan yang menyangkut :

a. Mengenai besarnya kredit

Besarnya atau jumlah kredit yang diberikan oleh bank dari waktu ke waktu, sangat tergantung pada besar atau kecilnya dana yang dapat disalurkan oleh bank untuk perkreditanya, terutama bila ada “pagu” yaitu plafond yang ditetapkan oleh bank sentral. Adapun besar atau kecilnya dana dimaksud akan ada batasnya dan tidak selalu terbatas (*unlimited= On gellimiter*). Sedangkan kebutuhan akan kredit akan menuntut, selama manusia terus berusaha atau menjalankan usaha/ perniagaannya.

b. Penyediaan Dana untuk penyaluran Kredit

Dengan adanya penetapan pagu atau tidak, bank perlu mempunyai kesiapan dalam penyediaan dana untuk pelayanan kredit kepada para pemohon pinjaman. Dalam pasal ini bank perlu memilih kebijakan tersendiri agar nasabah tidak dikecewakan.

c. Kemulusan Debitur (Pinjaman yang diberikan)

Manajemen, dengan sendirinya berpengharapan supaya semua piutang berjalan lancar. Artinya, mulus semenjak penyalurannya sampai diterimanya kembali/ pembayarannya kembali dengan tepat waktu, baik pokoknya maupun bunganya. Namun demikian timbul pertanyaan di benak kita, apakah harapan tersebut dapat terwujud, atau dengan kata lain ditanyakan, apakah semua kredit tersebut akan mulus.

d. Pengawasan (Pengendalian) kredit

Yang dimaksudkan pengawasan, tidaklah hanya dilakukan terhadap kredit yang diberikan semata – mata akan tetapi harus berjalan semenjak *budget*

pemberian kredit disusn, analisis kredit, penyaluran kredit, penerimaan kredit sampai dengan pengintensifan penagihan bila perlu.

Menurut Muljono (2007:20) dalam menetapkan kebijakan perkreditan tersebut harus diperhatikan 3 asas pokok yaitu :

a. Asas likuiditas

Asas likuiditas adalah suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari para nasabahnya atau dari masyarakat luas. Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila memenuhi kriteria antara lain :

1. Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
2. Bank tersebut memiliki asset lainnya yang dapat dicirkan sewaktu – waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.
3. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk utang.

b. Asas solvabilitas

Asas solvabilitas, usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.

c. Asas rentabilitas

Asas rentabilitas, sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya

7. Pengendalian Kredit Bank

a. Pengertian dan Tujuan

Pengendalian kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Menurut Hasibuan (2004:105), pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak, karena jika terjadi kredit macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus

didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar.

Menurut Hasibuan (2004:105) tujuan pengendalian kredit adalah untuk:

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman;
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak;
3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah;
4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan;
5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali;
6. Mengetahui posisi persentase *collectability credit* yang disalurkan bank;
7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank.

b. Sistem dan Jenis Pengendalian Kredit

1) Sistem Pengendalian Kredit

1. *Internal Control of Credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bank bersangkutan, meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit macet.
2. *Audit Control of Credit* adalah sistem pengendalian atau penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit, yaitu tentang kebenaran pembukuan kredit bank.
3. *External Control of Credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar baik oleh Bank Indonesia maupun akuntan publik.

2) Jenis-jenis Pengendalian Kredit

1. *Preventive Control of Credit* (PCC) adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. PCC dilakukan dengan cara:

- a. penetapan plafond kredit,
 - b. pemantauan debitur, dan
 - c. pembinaan debitur.
2. *Repressive Control of Credit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet.

c. Pengertian, Fungsi, dan Syarat Agunan Kredit

Menurut Hasibuan (2004:109), “agunan atau jaminan kredit adalah barang-barang dan/atau surat-surat efek yang diserahkan debitur kepada bank dan menjadi syarat utama dalam menentukan besarnya plafond kredit. Agunan kredit harus memenuhi keabsahan hukum, mempunyai nilai ekonomi, dan akan disita (dijual) untuk membayar kredit macet”.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa adanya jaminan. Maksud dari jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.

d. Fungsi Agunan Kredit

1. Untuk memenuhi persyaratan Bank Indonesia, setiap bank hanya boleh memberikan kredit jika ada jaminannya.

- a. Agunan harus berupa barang dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai nyata seperti tanah dan bangunan.
- b. Harga agunan harus lebih besar daripada kredit yang diberikan.
- c. Untuk menjamin pembayaran kredit macet dengan menyita (menjual) agunan.
- d. Keamanan dan keselamatan kredit akan lebih terjamin;
- e. Pemberian kredit akan lebih selektif sehingga korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dihindari.
- f. Debitur akan lebih berhati-hati mempergunakan kredit karena takut agunannya disita bank.
- g. Untuk melindungi keamanan tabungan masyarakat pada bank dari pemberian yang tidak wajar oleh manajer bank maka:
- h. Pimpinan bank tidak dapat memberikan kredit seenaknya saja;
- i. Agunan merupakan penjamin tabungan masyarakat karena bank akan menyita agunan jika kredit macet.

e. Syarat-syarat Agunan Kredit

1. Syarat hukum
 - a. Agunan harus mempunyai wujud nyata
 - b. Agunan harus merupakan milik debitur dengan bukti surat-surat autentiknya
 - c. Jika agunan berupa barang yang dikuasakan, pemiliknya harus ikut menandatangani akad kredit
 - d. Agunan tidak sedang dalam proses pengadilan

- e. Agunan bukan sedang dalam keadaan sengketa
 - f. Agunan bukan yang terkena proyek pemerintah
2. Syarat ekonomis
 - a. Agunan harus mempunyai nilai ekonomis pasar
 - b. Nilai agunan kredit harus lebih besar daripada plafond kreditnya
 - c. *Marketability*, yaitu agunan harus mempunyai pasaran yang cukup luas atau mudah dijual.
 - d. *Transferable*, yaitu agunan kredit yang diajukan debitur harus mudah dipindahtangankan baik secara fisik dari agunan tersebut.

f. Aspek-aspek Pertimbangan Kredit

1. Aspek hukum dan ekonomis dimaksudkan masalah keabsahan dan besarnya nilai pasar agunan yang akan diserahkan debitur.
2. Aspek umum dan man ajemen perusahaan debitur meliputi bentuk, nama, lokasi, bidang usaha, susunan pengurus, strutur organisasi, hubungan rekening, dan sebagainya.
3. Aspek teknis meliputi peralatan, perkembangan usaha, persediaan bahan baku, rencana usaha, dan sebagainya.
4. Aspek komersial usaha meliputi penjualan, persaingan dan masa depan perusahaan.
5. Aspek finansial meliputi struktur modal, rugi/laba, analisis biaya, dan kalkulasi kebutuhan kredit perusahaan.
6. Aspek *marketability* menyangkut masalah pemasaran agunannya.
7. Aspek tata cara pengikatan berupa hipotik, *fiducia*, *borg*, atau gadai.

8. Aspek penarikan kredit berupa kredit rekening koran atau rekening berjangka.

g. Pendekatan dalam Perencanaan Kredit

Demi mencapai tujuan perencanaan yang penuh dengan kendala, asumsi dan berbagai tugas, maka bank dapat menggunakan berbagai pendekatan dalam penyusunan perencanaan kredit. Pendekatan yang dilakukan bank tentu diharapkan dapat mengurangi deviasi yang mungkin terjadi. Menurut Taswan (2006: 160-161) pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk perencanaan kredit adalah :

- 1) Pendekatan Struktur Sumber Dana
Pada pendekatan ini bank akan menyusun rencana kredit dengan memperhatikan kemampuan penghimpun dana (volume dana), jenis waktu dana dan biaya masing masing dana. Pada pendekatan ini bank akan mengidentifikasi dana yang berbiaya bunga dan tidak berbiaya bunga. Oleh karena itu sumber dana berjangka pendek (*miss call money* dan masyarakat umumnya diletakkan pada pada kredit jangka pendek, sementara sumber dana berjangka waktu panjang dan tidak berbiaya bunga (modal) akan ditempatkan pada kredit jangka panjang.
- 2) Pendekatan Pasar
Pada pendekatan ini bank akan memperhatikan daya serap pasar kredit, pangsa kredit bank yang bersangkutan baik pada tingkat nasional maupun regional. pangsa kredit ini akan dilihat dari segmen kredit persektor atau per wilayah dengan berorientasi pada customer atau *buyer market*. Bank akan bertindak sebagai retail banking dan wholesale banking. Oleh karena itu penciptaan produk kredit yang berorientasi pad kebutuhan konsumen dan keunggulan pelayanan bank mutlak diperlukan pada pendekatan ini.
- 3) Pendekatan Anggaran
Pendektan ini pada dasarnya mendasarkan pada rencana kerja yang berupa angka – angka sebagai hasil investigasi, studi dan penelitian pasar, *production* dan *financial*. Anggaran ini dijadikan suatu rencana yang harus dicapai dimasa mendatang. Oleh karena itu penyusunan anggaran kredit tentu telah memperhatikan variabel daya serap pasar, kemampuan penghimpun dana, ketentuan regulasi perbankan. Misalnya *LLL (legal lending limit)*, *loanable found*, biaya bunga, biaya dana dan kondisi ekonomi pada umumnya.

4) Pendekatan Regulasi

Pendekatan perencanaan kredit ini didasarkan pada regulasi moneter dan perbankan yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen bank. Tugas manajemen bank adalah menyesuaikan dan menyikapi melalui antisipasi terhadap regulasi tersebut. Regulasi yang berkaitan dengan perkreditan umumnya akan berpengaruh pada biaya dana, lending rate, pola alokasi kredit, ekspansi kredit serta likuiditas bank.

Pada lain hal. Bank harus mengikuti rambu – rambu Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Batas ini bukan bermaksud membatasi ekspansi kredit yang bersangkutan, namun lebih bernuansa pemerataan atau penyebaran kredit. ketentuan ini jelas mempengaruhi rencana pola dan alokasi kredit. Sementara ekspansi kredit akan berhadapa dengan ketentuan *Loan to deposit ratio (LDR)* yang berkisar 85%-110%. Bank di ijinakan melakukan ekspansi selama mampu mengimbangi dengan jumlah dana yang diterima dengan maksimum rasio 110%.

C. Kebijakan Umum Perkreditan Bank

Berdasarkan Pedoman Penyusunan kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) dalam Suyatno (2003:186-204) kebijakan umum perkreditan bank mencakup beberapa aspek yaitu ;

1. Prinsip kehati – hatian

Pada setiap kebijakan umum perkreditan wajib dimuat dan ditetapkan secara tegas adanya prinsip kehati – hatian dalam perkreditan. Sekurang – kurangnya harus meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, tata cara kualitas kredit, dan profesionalisme serta pejabat perkreditan.

a. Kebijaksanaan pokok dalam perkreditan mencakup :

1) Pokok – pokok pengaturan mengenai :

- a) Prosedur perkreditan yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi, dan administrasi serta prosedur pengawasan kredit.
- b) Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus .

- c) Perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya di kapitalisasi.
 - d) Prosedur penyelesaian kredit bermasalah.
 - e) Tata cara penyelesaian barang agunan.
- 2) Pokok – pokok pengaturan mengenai pemberian kredit kepada pihak – pihak yang berkaitan dengan bank atau debitur besar tertentu yang sekurang – kurangnya mencakup :
- a) Batasan jumlah maksimum penyediaan keseluruhan fasilitas kredit yang akan diberikan oleh bank sendiri kepada pihak – pihak tersebut diatas dalam rangka presentase terhadap jumlah keseluruhan kredit dan jumlah modal bank berdasarkan perhitungan (KPMP)
 - b) Tata cara penyediaan kredit kepada pihak – pihak bank.
 - c) Persyaratan kredit kepada pihak – pihak tersebut diatas khususnya mengenai perbandingan suku bungan kredit dengan yang ditetapkan terhadap debitur – debitur lainnya serta bentuk agunan.
 - d) Kebijakan bank dalam pemberian kredit kepada pihak bank dalam kaitannya dengan pemberian Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- b. Tata cara penilaian Kualitas Kredit

Pada Kebijakan pemberian kredit harus ditetapkan bahwa penilaian kualitas kredit harus di dasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan

untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektabilitas kredit yang telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penggolongan Kualitas kredit menurut peraturan BI Nomor 7/2/PBI/2005 antara lain ;

- 1) Kredit lancar Lancar (pass), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).
- 2) Dalam Perhatian Khusus (special mention), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan
 - c. Mutasi rekening relatif aktif
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
- 3) Kurang Lancar (Substandard), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 - b. Sering terjadi cerukan.
 - c. Frekuensi rekening relatif rendah.

- d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan debitor.
 - f. Dokumentasi pinjaman lemah.
- 4) Diragukan (doubtful), apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga.
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- 5) Macet (loss), apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2. Organisasi dan manajemen kredit

Organisasi dan manajemen kredit sangat diperlukan bagi bank adalah untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan wajar dan telah mengandung unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan kredit hingga akhir proses. Pejabat – pejabat yang harus terkait dengan organisasi dan

manajemen kredit adalah dewan komisaris, direksi, komite kredit dan pejabat kredit lainnya. Pada setiap bank diharuskan memiliki Komite kebijaksanaan Perkreditan (KKP) yang terdiri dari direktur utama/presiden direktur dengan anggota sekurang – kurangnya direktur kredit, pimpinan satuan bidang operasional yang terkait dengan perkreditan dan Komite Kredit (KK) yang keanggotaannya ditetapkan direksi bank sesuai dengan kebutuhan masing – masing bank.

a) Tugas Komite Kebijaksanaan Kredit (KKP)

- 1) Membantu direksi bank dalam merumuskan kebijakan perkreditan
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan
- 3) Memberikan saran – saran langkah perbaikan
- 4) Memantau perkembangan dan kondisi dan portofolio perkreditan

b) Tugas Komite Kredit

- 1) Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang/ jenis kredit yang ditetapkan oleh direksi.
- 2) Melakukan evaluasi pendanaan secara berkala dan dilaporkan kepada dewan direksi.

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

Kebijakan persetujuan kredit harus memuat kebijaksanaan persetujuan kredit yang sekurang – kurangnya mencakup konsep hubungan total pemohon, penetapan batss wewenang kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit dan persetujuan pencairan kredit.

Kebijakan Persetujuan Kredit terdiri dari :

- 1) Konsep hubungan total perkreditan
Kebijakan persetujuan kredit harus didasarkan pada penilaian menyeluruh atas fasilitas kredit dimana di dalamnya termasuk kredit umum, pembelian SPBU, pembelian surat – surat berharga dan pemberian jaminan bank.
- 2) Penetapan batas wewenang perkreditan
Penetapan batas wewenang persetujuan kredit harus berupa keputusan direksi bank yang tertuang secara tertulis. Keputusan tersebut memuat wewenang dan tanggung jawab atas jumlah kredit.
- 3) Tanggung jawab pejabat pemutus kredit
Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal – hal berikut ini :
 - a. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya.
 - b. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat dan seksama (menggunakan prinsip 5C) serta *independent*.
- 4) Proses persetujuan kredit
Proses persetujuan kredit harus berlangsung melalui beberapa tahap sesuai dengan pedoman yang tertulis pemberian kredit yang sehat.
- 5) Perjanjian kredit, bentuk dan format
Perjanjian kredit, bentuk dan format ditentukan oleh masing – masing bank dan dibuat secara tertulis. Setiap kredit yang disetujui dan disepakati pemohon kredit harus dituangkan dalam perjanjian atau akad kredit secara tertulis.
- 6) Persetujuan pencairan kredit
Pada setiap pencairan kredit harus terjamin azas aman, terarah dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

4. Dokumentasi dan Administrasi kredit

Dokumentasi kredit merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin pengembalian kredit, maka bank wajib melaksanakan dokumentasi kredit dengan baik dan tertib. Pada dokumentasi kredit pihak bank memiliki kewajiban untuk :

- a. Menetapkan jenis – jenis dokumen yang diperlukan
- b. Pengecekan keabsahan dokumen kredit

- c. Menyimpan dan menggunakan dokumen kredit sesuai dengan kebutuhan.

Administrasi kredit merupakan salah satu aspek penting dalam proses kebijaksanaan kredit. Mengingat administrasi kredit sangat diperlukan dalam rangka penilai perkembangan dan kualitas kredit, pengawasan kredit, perlindungan kepentingan serta bahan masukan untuk penyusunan Kebijakan perkreditan bank dan laporan kepada bank Indonesia.

5. Penyelesaian kredit bermasalah

Tata cara menyelesaikan kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

- a. Penjadwalan kembali (*Reschedulling*)

Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan memberikan perpanjangan pembayaran. Dimana mengubah sebagian atau seluruh kesepakatan yang semula disepakati oleh debitur dengan cara pihak bank memberikan perubahan jangka waktu atau perpanjangan waktu pembayaran angsuran pokok bunga kredit pada debitur.

- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Pada penyelesaian kredit dengan *Reconditioning* adalah dengan memberikan keringanan kepada debitur dengan melakukan penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan dengan memperkecil pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit sehingga pelunasan kredit menjadi lebih lama.

c. *Restructuring*

Langkah penyelamatan dengan jalan *restructuring* dilakukan dengan cara melakukan perubahan syarat – syarat kredit berupa pemberian tambahan kredit.

d. Penyitaan Jaminan kredit

Langkah penyelamatan dengan jalan penyitaan jaminan kredit adalah langkah terakhir yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah yang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi. Dimana hal ini meyangkut penyitaan jaminan kredit yang di sepakati pada awal perjanjian. Dimana barang agunan yang di jaminkan akan menjadi milik perusahaan yang selanjtnya agar berfungsi sebagai pengganti pelunasan kredit oleh nasabah.

D. Efektivitas Kebijakan Kredit

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Harbani Pasolong (2007:4), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Menurut Mahmudi (2007:54) efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan.

Menurut Halim (2001:72) efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggungjawab dan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut

Melalui pengertian diatas dapat disimpulkan efektifitas adalah suatu hubungan sebab akibat yang dapat menentukan keberhasilan pencapaian suatu target melalui realisasi.

2. Efektivitas Kebijakan Kredit

Menurut Hasibuan (2004:92), kebijaksanaan perkreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar. Program perkreditan harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian. Yuridis artinya program perkreditan harus sesuai dengan undang-undang perbankan dan ketetapan Bank Indonesia. Ekonomis artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang disalurkan. Kehati-hatian artinya besar plafond kredit (*legal lending limit=BMPK*) harus ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C, 7P, dan 3R dari setiap calon peminjam.

Kebijaksanaan (*policy*) adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat *management action* akan dilakukan. Kebijakan perkreditan menurut Hasibuan (2004:92) antara lain:

- a. *Bankable*, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:
 1. *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
 2. *Effectiveness*, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.
- b. Kebijakan investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam

bentuk investasi primer dan sekunder, kebijaksanaan risiko, kebijaksanaan penyebaran kredit, serta kebijaksanaan tingkat bunga.

1. Investasi Primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti pembelian kantor, mesin, dan ATK.
2. Investasi Sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat.
3. Kebijaksanaan Risiko, maksudnya dalam penyaluran kredit harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan risiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara peyelesaiannya.
4. Kebijaksanaan Penyebaran Kredit, maksudnya kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.
5. Kebijaksanaan Tingkat Bunga, maksudnya dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antarbank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi (target) atau dengan rumus $E = R/T$. E:Efektivitas, R:Realisasi, T: Target R adalah proses dalam hal ini proses produksi, dan setiap proses terdiri dari input, throughput dan output” (Makmur, 2008:124). Pengukuran efektivitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi dan target sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Standar efektifitas Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan antara 90% - 100% berarti efektif.

3. Hasil perbandingan antara 80% - 90% berarti cukup efektif
4. Hasil perbandingan antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
5. Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif.

E. Analisis Kebijakan Pemberian Kredit dan Rasio Keuangan

1) Ketentuan Bank Indonesia Berkenaan dengan Prinsip Kehati-hatian Pemberian Kredit

Sebagaimana diketahui bahwa sumber dana perkreditan suatu bank sebagian besar berasal dari dana masyarakat antara lain berupa giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan lain sebagainya yang disimpan oleh masyarakat tanpa mendapat jaminan kebendaan apapun dari pihak bank yang bersangkutan. Masyarakat menyimpan dananya pada bank hanya berdasarkan kepercayaan bahwa mereka akan dapat menarik uangnya kembali sesuai dengan kesepakatan dengan bank yang bersangkutan. Dengan demikian seandainya terjadi masalah dalam pemberian kredit, misalnya terjadi kemacetan pengembalian pokok dan bunga dalam jumlah relatif besar, maka hal tersebut tidak hanya akan merugikan bank, melainkan juga akan merugikan nasabah penyimpan dana. Kemacetan kredit dalam jumlah tertentu tidak hanya membahayakan likuiditas bank melainkan juga akan berdampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat pada bank. Kepercayaan masyarakat yang menurun akan memperlemah sistem perbankan.

Sistem perbankan yang melemah akan berdampak kepada kondisi perekonomian nasional yang sulit tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, wajarlah pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia banyak menerbitkan ketentuan-

ketentuan/rambu-rambu yang harus ditaati sebagai upaya untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kebangkrutan suatu bank.

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2004:45) ketentuan-ketentuan tersebut yang menjadi sasaran/target sekaligus juga merupakan bagian dari Kebijakan Perkreditan Bank antara lain:

a. **Menentukan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) atau *LLL***

(*Legal Lending Limit*)

BMPK adalah limit atau batas maksimal pemberian kredit yang boleh diberikan suatu bank kepada calon debitur individual dan atau debitur terkait dengan kelompok atau grup usaha bank yang bersangkutan. BMPK yang efektif berlaku saat ini adalah:

- Untuk debitur individual sebesar 20% dari modal bank yang bersangkutan.
- Untuk debitur yang terkait atau berasal dari kelompok usahanya sebesar 25% dari modal bank

b. **Rasio kredit terhadap simpanan atau *Loan to Deposit Ratio (LDR)***

Bank Indonesia juga memberikan pembatasan jumlah kredit yang disalurkan secara keseluruhan melalui penetapan rasio/perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan dana pihak ketiga (masyarakat) yang berhasil dihimpun oleh bank yang bersangkutan.

Perbandingan tersebut biasa dikenal dengan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Ini berarti jumlah kredit terhadap dana pihak ketiga tidak boleh melebihi ketentuan. Menurut ketentuan Bank Indonesia, maka rasio yang paling sehat adalah paling tinggi 94,75%. Hal tersebut berarti dana yang terhimpun, secara optimal dapat disalurkan ke perkreditan yang merupakan aset yang paling produktif bagi bank. Tentunya apabila kredit tersebut berjalan baik. Di pihak lain, bank masih mempunyai alat likuid yang memadai untuk mengantisipasi penarikan dari para penyimpan dana.

Untuk menghitung *Loans to Deposit Ratio (LDR)* secara matematis dapat menggunakan rumus:

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

c. **Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* atau **Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)****

Ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang secara tidak langsung membatasi jumlah kredit yang diberikan adalah rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

CAR adalah perbandingan antara jumlah modal yang dimiliki suatu bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Semakin besar kredit yang disalurkan, maka semakin besar pula ATMR bank yang bersangkutan, sehingga CAR akan menurun. Dengan demikian apabila bank akan mengadakan ekspansi/perluasan pemberian kredit, maka harus memperhatikan jumlah modal yang dimiliki saat itu, yang berarti apabila CARnya sudah terbatas atau mendekati ketentuan minimal, maka ekspansi kredit tersebut harus dibarengi dengan penambahan modal tersebut.

Apabila pemilik bank tidak menambah modalnya maka CAR akan turun dibawah ketentuan yang berlaku yaitu 8%. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan besarnya ATMR yaitu ATMR aktiva neraca dan aktiva administratif sebagai berikut:

1. ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko masing-masing poin aktiva neraca.
2. ATMR aktiva administratif diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko masing-masing poin rekening administratif.
3. Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan jumlah modal bank (yaitu modal inti ditambah modal pelengkap) atau modal kantor cabang asing (bagi bank asing) dengan total ATMR (neraca ditambah administratif).
4. Dengan membandingkan rasio modal di atas, dapat diketahui besarnya rasio kecukupan modal (CAR) telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia atau belum. Ketentuan yang berlaku bagi bank umum non devisa, CAR minimum sekurang-kurangnya 8%. Untuk bank umum non devisa seyogyanya harus lebih tinggi dari 8% yaitu sekitar 12%.

d. Profitabilitas

Profitabilitas ialah kemampuan suatu bank untuk mendapatkan keuntungan.

Profitabilitas berarti keuntungan yang diperoleh bank yang sebagian besar bersumber pada kredit yang dipinjamkan. Tingkat keuntungan ini sangat tergantung pada kelancaran kredit yang diberikan kepada masyarakat. Jika terjadi kredit bermasalah yang mengarah pada kredit macet dan merugikan, maka tingkat profitabilitas pasti akan terganggu (Mahmoedin (2002:20)).

1. Return Of Asset

$$ROA = \frac{EBIT}{Total Asset} \times 100$$

Digunakan untuk mengukur perbandingan rasio laba sebelum pajak (*earning before tax*) selama 12 bulan terakhir terhadap rata – rata volume usaha dan periode yang sama.

2. BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional)

$$BOPO = \frac{\text{Operating expense}}{\text{operating income}} \times 100\%$$

Bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan pendapatan operasional bank dalam melakukan kegiatan operasional.

3. *Gross Profit Margin* (GPM)

$$GPM = \frac{\text{Operating Income} - \text{Operating Expense}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

Dipergunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba operasi melalui pendapatan operasi yang dihasilkan.

4. *Net Profit Margin*

$$NPM = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

Dipergunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui pendapatan operasi. Faisal Abdilah (126:2003)

5. *Return on Equity* (ROE)

$$ROE = \frac{\text{Net Income}}{\text{Equity Capital}} \times 100\%$$

Dipergunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui pendapatan operasi. Faisal Abdilah (126:2003)

6. *Net Income Total Assets*

$$\text{Net Income Total Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Dipergunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui penggunaan modal sendiri. Faisal Abdilah (127:2003)

7. *Rate Return on Loans*

$$\text{Rate Return on Loans} = \frac{\text{Interest Income}}{\text{Total Loans}} \times 100\%$$

Dipergunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola profitabilitas perusahaan. Faisal Abdilah (127:2003)

Peraturan Bank Indonesia Mengenai Tingkat Kesehatan Bank

Rasio keuangan	Peraturan BI
LDR	85% - 110%
CAR	>8%
ROE	5% - 12,5%
ROA	>2%
BOPO	70% - 80%
NPL	<5%

Sumber : Bank Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Nazir (2009:12) penelitian merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui metode penyelidikan yang hati – hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Permasalahan yang utama dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas kebijakan kredit yang dilaksanakan oleh manajemen bank guna meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah, serta teori – teori yang digunakan maka jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.

Menurut Nazir (2003:54), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan menurut Hermawan (2003:10) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena.

Berdasarkan uraian teoritis diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang meneliti objek baik manusia maupun objek – objek lainnya dimana penelitian ini akan memaparkan secara faktual dan akurat mengenai suatu fenomena yang terjadi tanpa bermaksud mengidentifikasi hubungan antar variabel.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk membatasi masalah dan menjadi pusat perhatian dari objek yang akan diteliti. Adanya fokus penelitian ini diharapkan sebagai acuan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan masalah. Sesuai dengan judul penelitian, maka fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran Efektivitas Kebijakan Kredit
 - a. Pengukuran efektivitas
 - b. *Loan Deposit Ratio* (LDR)
 - c. *Capital Adequacy ratio* (CAR)
2. Profitabilitas
 - a. *Return of Equity* (ROE)
 - b. *Return of Asset* (ROA)
 - c. *BOPO* (Biaya Operasional Pendapatan Operasional)
 - d. *Net Profit Margin* (NPM)
 - e. *Gross Profit Margin* (GPM)
 - f. *Net Income Total Asset*
 - g. *Rate Return On Loans*

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Bank BPR Dau Kusumadaja Malang yang terletak di Jl. Raya Sengkaling No.625 Dau Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian di BPR Dau Kusumadaja karena keberadaan Bank tersebut

memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, terutama bagi nasabah di seluruh wilayah malang khususnya di sektor perkreditan. Bank BPR Dau kusumadjaja terletak area yang strategis sehingga dapat dijangkau dan diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Serta alat transportasi menuju lokasi penelitian ini sangat mudah untuk ditemui oleh berbagai kalangan termasuk peneliti.

D. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Sumber data primer menurut Sugiyono (2011:225) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan pihak yang terkait dalam hal ini pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Cabang Malang. Data primer yang digunakan dapat berupa informasi tentang perusahaan, proses pemberian kredit dan, kendala yang dihadapi bank dalam menyalurkan kredit.
2. Sumber data sekunder menurut Sugiyono (2011:225) adalah merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan (laporan rugi laba, neraca) dan dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, karena data yang dihasilkan akan dipergunakan untuk menjawab masalah penelitian (Nazir, 2009:174). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melihat langsung dan mempelajari laporan, dokumen dan arsip, serta catatan – catatan yang ada pada perusahaan sesuai dengan masalah yang diteliti Sugiyono (2011:224)

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab pada pihak perusahaan guna mendapatkan keterangan atau gambaran mengenai objek yang diteliti Ruslan (2010:23)

F. Instrument Penelitian

Menurut Arikunto (2007:101) instrument penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut dalam berjalan secara sistematis dan memperoleh kemudahan.

Adapun instrument data yang digunakan adalah :

1. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi merupakan instrument penelitian berupa dokumen atau catatan yang berisi data pendukung penelitian.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden agar wawancara tidak melenceng dari topik penelitian.

G. Metode Analisis

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan profitabilitas bank dengan cara melihat kondisi keuangan maupun efektivitas manajemen kredit PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Langkah – langkah analisis data yang akan dilakukan peneliti untuk mengetahui efektivitas manajemen kredit terhadap profitabilitas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis pengukuran terhadap kebijakan pemberian kredit yang meliputi:

- a. Pengukuran efektivitas keuangan

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- a. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

- b. *Capital Adequency Ratio (CAR)*

$$\text{Capital Adequency Ratio} = \frac{\text{modal bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2. Melakukan analisis pengukuran profitabilitas bank

- b. *Gross Profit Margin (GPM)*

$$GPM = \frac{\text{Operating Income} - \text{Operating Expense}}{\text{Operating Income}} \times 100$$

c. *Net Profit Margin*

$$NPM = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

d. *Return on Equity (ROE)*

$$ROE = \frac{\text{Net Income}}{\text{Equity Capital}} \times 100\%$$

e. *Return Of Asset (ROA)*

$$ROA = \frac{EBIT}{\text{Total Asset}} \times 100$$

f. *BOPO*

$$BOPO = \frac{\text{Operating expense}}{\text{operating income}} \times 100\%$$

f. *Net Income Total Assets*

$$\text{Net Income Total Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

g. *Rate Return on Loans*

$$\text{Rate Return on Loans} = \frac{\text{Interest Income}}{\text{Total Loans}} \times 100\%$$

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat Dau Kusumadjaja

PT. BPR Dau Kusumadjaja Malang berdiri pada tahun 1995 berdasarkan akta Pendirian perusahaan No. 28 tgl 28 April 1995 di hadapan notaris Roy Pudyo Hermawan, SH. PT. BPR Dau telah di daftarka di kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia dengan No. C2-12.148.01.01 tanggal 27 September 1995. Modal awal PT. BPR Dau Kusumadjaja adalah 300.000.000 dan modal disetor sebesar 60.000.000 untuk memulai melaksanakan kegiatan Perkreditan. Izin usaha telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. Kep-155/KM.17/1996 pada tanggal 1 Mei 1996 dan dinyatakan resmi pelaksanaan operasionalnya tanggal 8 Juni 1996 oleh Bapak Langka Arismunandar selaku Pemimpin Cabang Bank Indonesia Malang.

Berdasarkan akta no.21 tanggal 4 Juni 2000 dibuat di hadapan notaris Asrul Hakim, SH dilakukan perubahan anggaran dasar, yang meningkatkan modal dasar menjadi 1.000.000.000,00 dan modal disetor sebesar 250.000.000,00. Pada tgl 19 Juni 2008 dilakukan penyeteroran modal sbesar 1.000.000.000,00 dihadapa notaris Malang Ita Kristiani, SH dengan akta No.17.Pada tahun 2008 dilakukan perubahan anggaran dasar yang disesuaikan dengan UU republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Ham RI No. 56484.AH01.02. Pada tanggal 5 mei 2009 RUPS secara

notariil tentang peningkatan modal disetor menjadi 1.600.000.000,00 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HamM RI tanggal 8 April 2010.

Kepemilikan perusahaan sejak tahun 1995 hingga tahun 2012 adalah Sdr. Irwanto dan Sdri. Agustina Lany, SH dengan komposisi saham masing – masing 50% dan berdasarkan akta akuisisi No.11 tanggal 10 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Malang Niluh Elita Maharani, SH maka kepemimpinannya diambil alih oleh kepemilikan yang baru. Berdasarkan RUPS secara notariil dengan akta no. 17 tanggal 18 desember 2012 dihadapan Notaris Surabaya Rosidah,SH diputuskan perubahan modal dasar menjadi 5.000.000.000,00 dan perubahan kepemilikan dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Pemegang Saham Pengendali : Ashdita Apriliasari, ST
- b. Pemegang Saham Biasa : Sugeng Hariyanto, SE. MM
- c. Pemegang Saham Biasa : Leny Aida Shicha, SE
- d. Pemegang Saham Biasa : Sunardi, SH

2. Visi, Misi dan Motto PT. BPR Dau Kusumadaja

a. Visi

Menjadikan Bank yang terus bertumbuh dan berkembang secara wajar dengan didukung sumber daya manusia yang profesional.

b. Misi

- 1) Mendorong dan mengembangkan udaha mikro, kecil, menengah menjadi lebih maju dan lebih produktif serta melayani seluruh kebutuhan ekonomi masyarakat.

c. Motto

“Bersama Kita Pasti Bisa”

3. Struktur Organisasi PT. BPR Dau Kusumadaja

a. Sumber Daya Manusia pada Bank BPR Dau Kusumadaja Malang

Pada pelaksanaan operasional tahun 2014 Bank BPR Dau Kusumadaja di dukung oleh 25 personil yang terdiri dari : 2 orang komisaris, 2 orang direksi, 2 orang kepala cabang, 3 orang kepala seksi, 14 orang karyawan, 2 orang satpam, 2 orang pramubakti dan 2 orang driver.

Tabel 1

Data Statistik Tingkat pendidikan PT. BPR Dau Kusumadaja Malang

Status Pegawai	Non Strata	D3	S1	S2	Jumlah
Pegawai Tetap	9	1	5	1	16
Pegawai Tidak Tetap	2	2	5	0	9
Jumlah	11	3	10	1	25

Sumber : PT. BPR Dau Kusumadaja Malang

Tabel 2

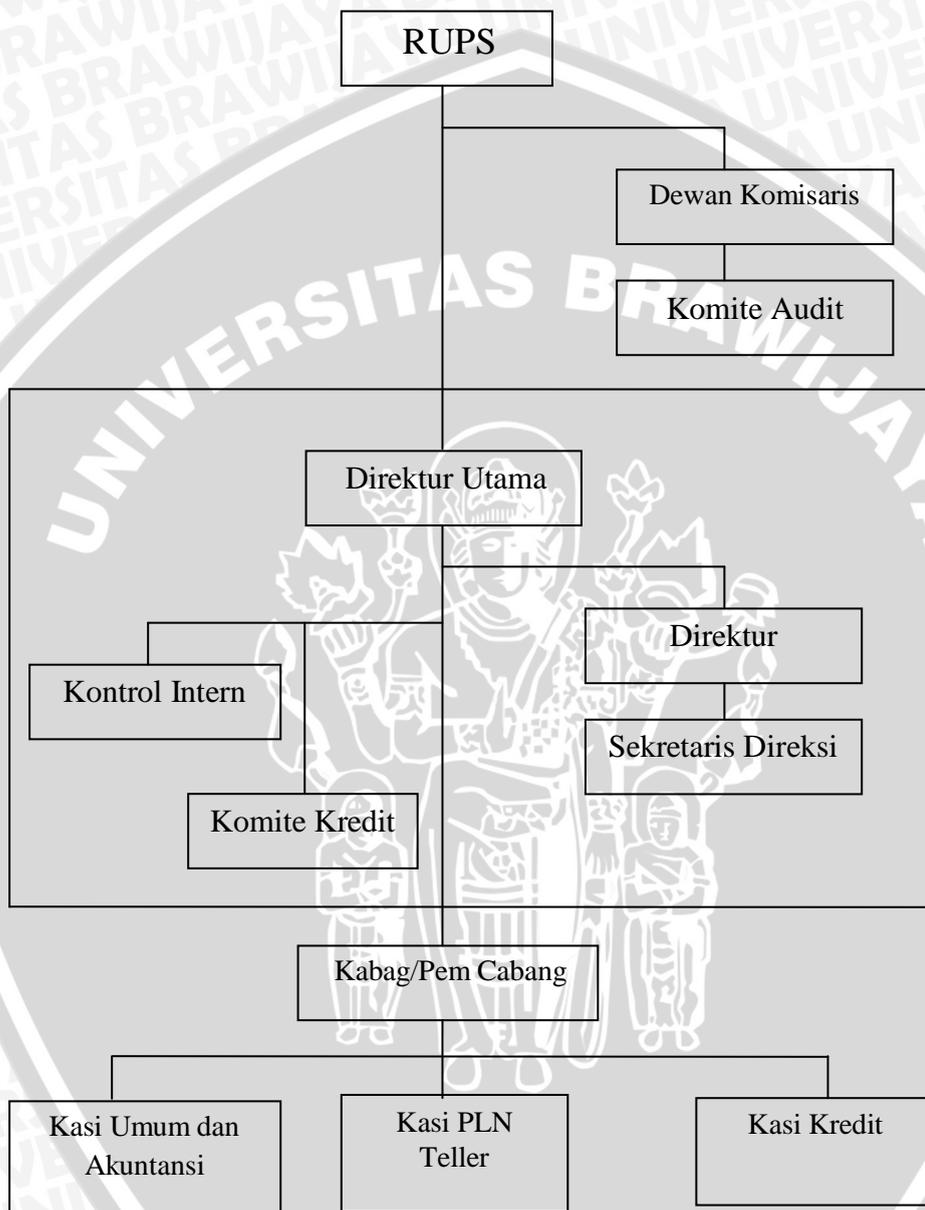
Data Statistik SDM PT. BPR Dau Kusumadaja Malang

Status Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
	Pria	Wanita	
Pegawai Tetap	9	7	16
Pegawai Tidak Tetap	4	5	9
Jumlah	13	12	25

Sumber :PT. BPR Dau Kusumadaja Malang

b. Struktur Organisasi PT. BPR Dau Kusumadjaja Malang

Gambar 1. Struktur Organisasi BPR Dau Kusumadjaja Malang



Sumber : BPR Dau Kusumadjaja

Tugas masing – masing bagian PT. BPR Dau Kusumadjaja

1) Dewan Komisaris

- a. Melaksanakan supervise terhadap direksi.



- b. Mengawasi pekerjaan dan tindakan direksi dalam pengurusan harta milik dan pengelolaan perusahaan.
 - c. Memberi saran dan nasehat kepada Direksi
 - d. Menganalisa dan menerma hasil pencapaian tujuan bank.
- 2) Komite Audit
- a. Membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan
 - b. Memastikan kualitas laporan keuangan
 - c. Meningkatkan efektivitas fungsi audit
- 3) Direktur Utama
- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan – kegiatan administrasi keuangan kepegawaian dan kesekretariatan.
 - b. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar.
 - c. Mengendalikan uang pendapatan hasil dari penagihan rekening nasabah.
- 4) Direktur
- a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan – kebijakan perusahaan
 - b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian
 - c. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

- 5) Sekretaris Direksi
 - a. Membantu tugas dewan direksi antara lain membuka surat, menerima dikte, menerima tamu, menerima telepon dan menyimoan arsip surat.
 - b. Menyusun dan membuat jadwal kegiatan pimpinan
- 6) Komite Kredit
 - a. Membantu direksi dalam menetapkan arah kebijakan perkreditan.
 - b. Memberika pengarahan apabila perlu dilaukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif
 - c. Memberikan keputusan atau rekomendasi atas permohonan kredit yang diajukan
- 7) Kontrol Intern
 - a. Melakukan atau mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaa tugas kantor.
 - b. Mengadakan pemeriksaan atas administrasi bank anggaran pendapatan blanja bank
 - c. Meneliti kebenaran dan kelengkapan laporan – laporan keuangan terutama neraca dan perhitungan rugi laba.
 - d. Mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit – unit kerja.
 - e. Menyusun rencana keuangan

- 8) Kabag/ Pem Cabang
 - a. Mengelola kelancaran tugas operasional BPR sehingga sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 9) Kasi Umum dan Akuntansi
 - a. Melaksanakan administrasi dan korespondendi untuk keperluan bank
 - b. Melaksanakan pembayaran gaji dan biaya untuk keperluan bank
 - c. Melaksanakan pengawasan dan kedisiplinan pegawai.
 - d. Menerima lamaran – lamaran pekerjaan
 - e. Menghitung dan menetapkan hal yang berhubungan dengan fasilitas pegawai
 - f. Mengurus dan menyelesaikan pemberhentian pegawai.
- 10) Kasi PLN/ Teller
 - a. Bertugas perihal pencairan dana pinjaman kepada nasabah
 - b. Menerima proses mengenai pencairan dana dan pembayaran.
- 11) Kasi Kredit
 - a. Mengatur penyelenggaraan administrasi kredit, persiapan kredit perjanjian kredit.
 - b. Memelihara dan bertanggung jawab terhadap dokumen – dokumen kredit
 - c. Meneliti syarat –syarat untuk mengadakan analisa kredit

4. Jenis – Jenis Kredit PT. BPR Dau Kusumadaja

1) Kredit Umum atau Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah fasilitas peminjaman dana oleh BPR Dau Kusumadaja untuk masyarakat yang memiliki usaha dan dana pinjaman dari pihak bank sendiri, bukan pemerintah. Sumber dana pinjaman inilah yang membedakan antara kredit BPR dan kredit modal kerja. Kriteria usaha yang bisa diajukan untuk pertambahan modal kredit lainnya yaitu usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun dan catatan keuangan usaha tersebut cukup baik.

Adapun Kredit yang termasuk kedalam kredit modal kerja yaitu ;

1. Kredit Tanpa Angsuran

Kredit tanpa angsuran adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh BPR Dau Kusumadaja Malang untuk masyarakat umum yang penggunaannya untuk modal kerja dan atau pembiayaan lainnya yang layak. Kredit tanpa angsuran ini lebih banyak diberikan kepada petani baik itu petani ladang padi, sayur mayur, buah dan lain – lain, dengan bunga 2,75% perbulan dalam jangka waktu 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Kemudian sampai akhir jatuh tempo debitur membayar bunga dan angsuran pokoknya.

Adapun syarat bpengajuan Kredit tanpa angsuran ini yaitu :

- a. Mengisi formulir permohonan kredit
- b. Fotokopi KTP
- c. Pas foto 4 x 6 berwarna

- d. Fotokopi kartu keluarga
- e. Akta pendirian usaha
- f. Mempunyai barang agunan seperti BPKB, SHM, SHGB, dan sertifikat – sertifikat lainnya.

Pada kredit tanpa angsuran plafond yang diberikan tergantung dengan barang agunan yang dijaminan kepada bank. Pinjaman diberikan sebesar 60 % dari besarnya nilai agunan apabila menggunakan nama sendiri, apabila agunan atas nama orang lain diberikan pinjaman sebesar 50 %. Proses pembayarannya adalah dengan membayar bunga pinjaman tiap bulan tanpa angsuran pokok. Pembayaran dengan angsuran pokok di lakukan pada saat jatuh tempo.

2. Kredit Angsuran

Kredit yang diberikan oleh BPR Dau Kusumadaja Malang untuk masyarakat umum yang memiliki pendapatan tetap atau gaji setiap bulannya, dengan bunga 1,75% perbulan dan jangka waktu maksimal 36 bulan atau 3 tahun. Sampai akhir jatuh tempo debitur harus membayar bunga dan angsuran setiap bulannya.

Adapun persyaratan kredit Angsuran ini, yaitu :

- a. Mengisi formulir permohonan kredit
- b. Fotokopi KTP
- c. Pas foto 4 x 6 berwarna
- d. Fotokopi kartu keluarga

e. Mempunyai barang agunan seperti BPKB, SHM, SHGB, dan sertifikat – sertifikat lainnya.

Pada kredit angsuran plafond yang diberikan tergantung dengan barang agunan yang dijaminkan kepada bank. Pinjaman diberikan sebesar 60 % dari besarnya nilai agunan apabila menggunakan nama sendiri, apabila agunan atas nama orang lain diberikan pinjaman sebesar 50 %. Proses pembayarannya adalah dengan membayar bunga pinjaman dan angsuran pokok pada tiap bulannya.

2) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang diperuntukkan untuk pegawai yang memiliki pendapatan tetap setiap bulannya dan digunakan untuk keperluan konsumsi atau keperluan pembiayaan lain. Adapun Jenis Kredit Konsumsi yaitu :

1. Kredit Pegawai

Kredit pegawai adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh BPR Dau Kusumadjaja malang berupa pinjaman dana kepada masyarakat yang berstatus pegawai disalah satu perusahaan atau instansi pemerintah. Tahapan realisasi kredit untuk pegawai sama dengan kredit – kredit lainnya. Akan tetapi kredit pegawai tidak melalui tahapan survey usaha karena yang menjadi tinjauan adalah gaji pokok calon debitur.

Pada kredit konsumtif diberikan plafond pinjaman maksimal Rp.50.000.000 dan angsuran sebesar 40% dari gaji perbulan.

B. Penyajian Data

1. Data Realisasi Kredit PT. BPR Dau Kusumadjaja Malang

Tabel 3

Data Realisasi kredit

Tahun	Realisasi kredit
2011	3.253.879.000
2012	2.966.004.000
2013	9.898.300.000

Sumber : BPR Dau Kusumadjaja

Data realisasi kredit PT. Bank BPR Dau Kusumadjaja per tahun mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2011 realisasi kredit sebesar Rp. 3.253.879.000 menurun hampir Rp. 300.000.000 yaitu sebesar Rp. 2.966.004.000 pada tahun 2012. Pada tahun 2013 realisasi kredit PT. Bank BPR Dau Kusumadjaja meningkat signifikan sebesar 9.898.300.

2. Data Kolektabilitas PT. BPR Dau Kusumadjaja Malang

Tabel 4

Data Kolektabilitas PT. BPR Dau Kusumadjaja

Kolektabilitas	2011	2012	2013
Lancar	2.773.629.000	2.937.580.000	7.954.663.000
Kurang Lancar	110.385.000	52.793.000	67.116.000
Diragukan	184.465.000	47.497.000	49.251.000
Macet	122.324.000	155.774.000	117.708.000

Sumber : BPR Dau Kusumadjaja Malang

Pengelolaan kredit bermasalah merupakan faktor yang perlu diperhatikan oleh suatu perbankan karena terkait dengan kesehatan bank. Bank Indonesia telah menetapkan batas tingkat kewajaran *Non Performing Loans*, yaitu sebesar 5%. Pada Bank BPR dan Kusumadaja penggolongan kualitas kredit ada 4 tingkatan yaitu Kolektabilitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

3. Data Jumlah Kredit Bermasalah

Tabel 5

Tabel Data Jumlah Kredit Bermasalah PT. BPR Dau Kusumadaja

Tahun	Kredit Bermasalah			Jumlah Kredit Bermasalah	Jumlah Kredit	NPL
	Kurang lancar	Diragukan	Macet			
2011	110.385	52.793	67.116	130.947	2.904.576	13,07%
2012	184.465	47.497	49.251	281.231	3.218.811	8,02%
2013	122.324	155.774	117.708	395.806	8.350.469	2,86%

Sumber : BPR Dau Kusumadaja Malang

4. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit adalah langkah – langkah yang dilaksanakan oleh pihak bank yang berhubungan dengan kegiatan pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit ini adalah sebagai upaya pengendalian hubungan antara debitur dan pihak bank dalam perjanjian kredit yang akan diberikan. Hal tersebut dimaksudkan agar kredit yang diberikan memberikan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Berikut prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan di BPR Dau Kusumadaja Malang :

1) Permohonan Kredit oleh nasabah

Tahapan pertama yang dilakukan dalam pemberian kredit adalah nasabah menyerahkan formulir permohonan kredit yang diberikan oleh pihak bank. Hal ini dimaksudkan agar bank mengetahui kegunaan dan kebutuhan nasabah dalam permohonan kredit. Isi formulir permohonan kredit antara lain.

- a. Identitas diri calon debitur.
- b. Jenis permohonan kredit yaitu, permohonan baru, tambahan, perpanjangan, penurunan.
- c. Jumlah yang dibutuhkan
- d. Tujuan penggunaan.
- e. Sumber pengembalian
- f. Jangka waktu
- g. Suku bunga (diisi oleh pihak bank)
- h. Agunan/jaminan
- i. Tanda tangan pemohon

2) Pengumpulan data pendukung oleh Account Officer

Setelah surat permohonan kredit diterima maka dilakukan registrasi pada buku permohonan kredit. Apabila permohonan tersebut dinilai layak untuk diproses, account officer akan meminta data pendukung, antara lain :

- a. Identitas calon debitur (KTP/SIM) termasuk kartu keluarga atau identitas usaha.
- b. Lokasi usaha dan tahun pendirian.
- c. Akta pendirian perusahaan beserta perubahan – perubahannya.

- d. Ijin usaha yang dimiliki (SIUP, TDUP, TDP, SITU, IMB, HO, dan ijin lain terkait dengan usaha yang didirikan)
- e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- f. Laporan Keuangan 3 bulan terakhir.
- g. Omzet penjualan 3 bulan terakhir.
- h. Rencana penjualan, pembelian, produksi dan pemasaran perusahaan.
- i. Untuk calon debitur berbadan hukum (PT, CV, Koperasi) harus melampirkan data manajemen perusahaan.

3) Analisa Kredit

Proses analisa kredit dilakukan untuk mengetahui kebutuhan calon debitur dan kemampuan calon debitur untuk dapat memenuhi semua perjanjian yang akan dilakukan antara perusahaan dan calon debitur. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan sehingga kredit yang dibutuhkan akan tepat guna baik kepada calon debitur maupun kepada calon debitur. Data kredit yang akan di analisa mencakup beberapa aspek yaitu: aspek hukum, manajemen, sosial ekonomi, pemasaran, teknik produksi, dan jaminan keuangan. Berikut langkah

– langkah analisa kredit :

- a. Wawancara dengan calon debitur.
- b. Kunjungan/ peninjauan ke tempat usaha calon debitur.
- c. Melakukan peninjauan ke lokasi jaminan.
- d. Melakukan konfirmasi (*re-checking*)
- e. Melakukan *trade / bank checking*.

Sebagai bahan dokumentasi sebaiknya dilakukan pengambilan photo atas tempat usaha calon debitur maupun jaminan yang dipergunakan. Hal ini perlukan untuk lebih meyakinkan pihak yang terlibat dalam pemberian kredit maupun pihak luar yang melakukan pemeriksaan.

Setelah data tersebut dapat diyakini, langkah selanjutnya data tersebut diuji lagi kebenarannya dengan beberapa pendekatan antara lain :

1) Aspek Hukum

Aspek hukum yaitu melihat badan usaha yang akan di biayai apakah telah mendapatkan persetujuan dan ketentuan hukum perusahaan yang berlaku. Hal ini antara lain izin – izin pendirian usaha seperti (SIUP, TDUP, TDP, SITU, IMB, HO, dan izin lain terkait pendirian usaha milik nasabah PT. BPR Dau Kusumadjaja.

2) Aspek Keuangan

Pada aspek keuangan pihak Bank BPR Dau Kusumadjaja meneliti cash flow atau aliran dana yang dapat dilihat melalui laporan keuangan pihak perusahaan calon nasabah beberapa bulan terakhir. Aspek ini sangat diperlukan adanya agar dapat mengetahui kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, termasuk pengembalian pinjaman dan pembayaran bunga kepada bank tepat pada waktunya

3) Aspek Manajemen

Pada aspek manajemen pihak bank menganalisa dari beberapa pertanyaan yang diajukan mengenai sumber daya manusia pada perusahaan atau usaha tersebut. Dimana aspek manajemen sangat

berpengaruh pada kelangsungan usaha nasabah. Diharapkan manajemen memiliki wawasan dan tanggung jawab yang cukup mengenai bidang usahanya agar perusahaan yang didirikan tetap lancar. Sehingga dengan demikian pihak bank akan mempertimbangan pemberian kredit kepada pemilik usaha.

4) Aspek Sosial Ekonomi

Aspek sosial dan ekonomi adalah lebih pada arah kemanfaatan dimana usaha yang didirikan tersebut bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau bisa dikategorikan usaha ini adalah usaha yang padat karya.

5) Aspek Teknis/ produksi

Pada penilaian aspek teknis atau produksi dapat dilihat pada riset langsung terhadap usaha calon nasabah oleh pihak bank. Penilaian aspek teknis di dasarkan atas lokasi/ mesin yang digunakan. Disertai dengan penilaian mengenai tenaga ahli, tenaga kerja dan bahan baku yang harus disediakan dengan harga yang wajar.

6) Aspek Jaminan

Aspek jaminan ini sangat diperlukan sebagai jaminan bagi bank untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet atau kecurangan pembayaran angsuran oleh para nasabah. Dimana aspek jaminan pada hal ini diperlukan yang marketable dimana apabila nantinya harus di ambil oleh pihak bank jaminan ini masih dapat diterima pada pasar sehingga tidak menyulitkan pihak bank.

Analisa terhadap calon debitur dapat dilakukan secara mendalam dengan pendekatan 5C, yaitu :

a. *Character*

Karakter atau watak merupakan hal yang penting dalam pemberian kredit, namun dalam mempelajari karakter seseorang calon debitur bukan merupakan hal yang mudah dan cepat. Pada BPR Dau Kusumadjaja cara menilai karakter dari seorang calon debitur yaitu dengan melihat data – data riwayat hidup calon debitur dan melakukan wawancara secara langsung dengan calon debitur mengenai latar belakang nasabah baik bersifat pribadi maupun umum seperti pekerjaan dan lainnya. Sehingga akan nampak pada setiap jawaban yang diberikan oleh calon nasabah pada saat wawancara.

b. *Capacity*

Capacity dapat diartikan kemampuan seseorang dalam berkomitmen untuk dapat memahami kewajiban pengembalian kredit dilakukan pada pihak bank. Penilaian ini diperlukan untuk menilai kemampuan calon debitur pada sisi penghasilan hidup dan biaya hidup sehari – hari. Pada bank BPR Dau Kusumadjaja penilaian ini dilakukan dengan wawancara mengenai penghasilan dan biaya hidup sehari – hari calon debitur .

Capacity calon debitur dapat dilihat juga dari usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Jika usaha tersebut memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang, maka hal ini akan menjadi salah satu pertimbangan pihak bank dalam memberikan kreditnya kepada calon

debitur. Sehingga dengan demikian dapat diukur kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban membayar kredit kepada pihak bank.

c. *Capital*

Penilaian mengenai sisi permodalan dibutuhkan untuk menganalisa mengenai jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur. Untuk melihat efektifnya penggunaan modal, dapat dilihat dari laporan keuangan berupa laporan keuangan dan neraca) dengan melakukan pengukuran seperti segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan pengukuran lainnya.

Pada bank BPR Dau Kusumadaja penilaian pada sisi modal dilakukan pada pemohon jenis kredit Modal kerja. Kredit modal kerja biasanya banyak diajukan oleh para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Proses penilain dapat dilihat dari laporan keuangan atau proposal yang dibuat oleh calon debitur. Hal ini sangat perlu dilakukan agar pihak bank dapat memberikan bantuan kredit modal secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan sehingga modal yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh calon debitur.

d. *Collateral*

Colateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan

dapat dipergunakan secepat mungkin. Semua bank yang memberikan kredit kepada nasabah, mensyaratkan adanya jaminan yang diberikan oleh calon debitur kepada pihak bank.

Hal ini perlu karena pemberian kredit kepada calon debitur memiliki resiko tinggi. Begitupun kebijakan pemberian kredit pada bank BPR Dau Kusumadjaja. Dalam setiap produk kredit yang disalurkan kepada calon debitur, Bank BPR mensyaratkan adanya jaminan/agunan dari calon debitur. Jaminan ini dapat berupa sertifikat tanah, sertifikat rumah, BPKB motor atau mobil, SK pegawai dan lainnya yang nilainya tidak kurang dari jumlah kredit yang diberikan kepada calon debitur.

e. *Condition*

Penilaian mengenai pemberian kredit terhadap calon debitur perlu di pertimbangkan mengenai faktor kondisi ekonomi dan politik. Karena kondisi tersebut dapat mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk jangka waktu tertentu yang memungkinkan mempengaruhi kelancara usaha dari perusahaan yang akan memberikan kredit. Suku bunga dan tingkat inflasi merupakan faktor yang menjadi pertimbangan bank dalam proses penilaian.

Proses analisa kredit adalah proses yang sangat menentukan untuk mengambil kebijakan dalam pemberian kredit kepada calon nasabah atau debitur. Maka dari itu diperlukan waktu dan proses analisis yang tidak cukup lama agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Berikut kriteria nasabah yang diprioritaskan pada Bank BPR Dau Kusumadjaja:

- a) Nasabah yang jujur, mempunyai integritas tinggi untuk memenuhi kewajibannya.
- b) Nasabah yang mempunyai usaha maju dan menguntungkan.
- c) Nasabah yang memiliki usaha yang stabil dan berkembang.
- d) Nasabah yang memiliki administrasi yang teratur dan terbuka untuk diadakan penilaian.

4) Komite kredit

Setelah diadakan penilaian maka bagian analis kredit akan merekomendasikan berkas pengajuan kredit kepada komite kredit. Komite kredit Keanggotaannya sebagai berikut :

- 1) Pimpinan dan Wakil pimpinan
- 2) Kepala bagian Kredit
- 3) Kepala Bagian operasional

Apabila keputusan komite kredit menyatakan permohonan tersebut ditolak, maka keputusan tersebut segera diberitahukan kepada pemohon kredit yang bersangkutan secara tertulis. Alasan umum penolakan terhadap permohonan kredit antara lain:

- a. Usaha tidak layak
- b. Jaminan tidak mencukupi
- c. Karakter calon debitur yang kurang baik menurut penilain bank
- d. Kemampuan bayar tidak memungkinkan

Selanjutnya apabila komite kredit mengeluarkan keputusan menyetujui permohonan kredit tersebut maka tahap selanjutnya adalah mengadakan perjanjian kredit antara pihak bank dengan calon debitur.

5) Pengikatan Kredit

Proses kredit dapat dilaksanakan apabila komite kredit menyetujui kredit yang diajukan oleh calon debitur. Pelaksanaan perjanjian kredit ini disebut dengan akad kredit antara pihak bank dengan pemohon yang dituangkan dalam sebuah akta perjanjian kredit.

Melalui perjanjian kredit dicantumkan segala hak dan kewajiban masing – masing pihak, misalnya hal yang menyangkut tentang syarat – syarat pelaksanaan kredit, syarat pembayaran kembali, benda jaminan, dan jumlah lamanya kredit itu.

Hal – hal lain yang tertulis dalam akta perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Maksimum jumlah kredit
- b. Jangka waktu kredit
- c. Bunga dan provisi
- d. Bea materai
- e. Bentuk kredit
- f. Cara penarikan dan pelunasan kredit
- g. Jaminan kredit
- h. Asuransi (untuk mencegah apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan)
- i. Ketentuan – ketentuan tambahan

Kemudian pengikatan kredit dalam Akta Notaris/ PPAT dan membuat perjanjian Hak Tanggungan. Setelah notaris /PPAT dan pihak bank melakukan

pengikatan kreditnya secara yuridis, maka fasilitas pemberian kredit untuk debitur yang bersangkutan sudah dapat dicairkan.

6) Realisasi Kredit

Realisasi kredit adalah tahapan terakhir yang dilakukan oleh pihak bank untuk mencairkan dana yang disetujui oleh pihak bank terhadap calon debitur. Proses pencairan kredit sendiri dapat dilaksanakan pada hari itu juga. Tahapan realisasi kredit dapat dilakukan apabila :

- a. Surat penegasan persetujuan kredit (SPPK) telah dikembalikan dan ditandatangani diatas materai oleh calon debitur.
- b. Semua dokumen telah dilengkapi dan diverifikasi secara legal maupun secara administratif.
- c. Pengikatan kredit telah dilakukan secara baik dan benar (Akad, kredit, Surat Aksep, dan Surat Pengakuan Hutang)
- d. Pengikatan jaminan telah dilakukan secara baik dan benar (SKMHT/APHT, FEO, Gadai, Cessie)
- e. Semua dokumen kredit telah diperiksa dan ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- f. Telah dilakukan cek list atas semua kelengkapan data / dokumen kredit.
- g. Memastikan biaya yang dikenakan berupa provisi, administrasi dan lainnya telah dilunasi oleh calon debitur.
- h. Melakukan dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu pekerjaan pengarsipan yang dilakukan setelah proses pemberian kredit

dilaksanakan dengan baik dan benar oleh pihak yang terlibat di dalam pemberian kredit.

5. Kebijakan Pemberian Kredit pada PT. Bank BPR Dau Kusumadajaja Malang

1) Prinsip Kehati – hatian

Pada PT. BPR Dau Kusumadajaja telah melaksanakan kebijaksanaan pokok dalam perkreditan yang berisi mengenai tata - cara pemberian kredit, pokok pengaturan pemberian kredit, serta kredit yang perlu dihindari dan berisiko.

Hal tersebut antara lain :

1. Kebijakan pokok perkreditan
 - a. Prosedur perkreditan yang sehat yaitu prosedur persetujuan, prosedur dokumentasi, dan administrasi kredit serta prosedur pengawasan kredit.
 - b. Kredit yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
 - c. Prosedur penyelesaian kredit macet dan pelaporan kredit macet.
 - d. Tata cara penyelesaian barang agunana kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.
2. Pokok – pokok pengaturan mengenai pemberian kredit
 - a. Tata cara penyediaan kredit kepada pihak – pihak bank.
 - b. Kebijakan bank dalam pemberian kredit kepada pihak – pihak bank dalam kaitannya dengan pemberian batas maksimum pemberian kredit. kebijakan kredit bank mengenai batas maksimum pemberian kredit di dasarkan pada masing – masing jenis kredit yang diberikan.

- c. Persyaratan kredit kepada pihak – pihak terkait mengenai perbandingan suku bunga kredit dengan yang ditetapkan terhadap debiutr serta bentuk agunan.

3. Tata cara penilaian Kualitas Kredit

Penggolongan kualitas Kredit Bank BPR Dau Kusumadjaja berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum segi kualitas kredit, yaitu:

1. Lancar (pass), apabila memenuhi kriteria:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran 1-3 kali
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).

2. Kurang Lancar (Substandard), apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sebanyak 4 – 6 kali
- b. Sering terjadi cerukan.
- c. Frekuensi rekening relatif rendah.
- d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan debitor.
- f. Dokumentasi pinjaman lemah.

3. Diragukan (doubtful), apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sebesar 7 -9 kali
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - c. Terjadi kapitalisasi bunga.
 - d. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
4. Macet (loss), apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sebanyak 10 – 12 kali.
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2) Organisasi dan Manajemen Kredit

Organisasi dan manajemen yang dijalankan bank sudah baik. Bank telah membagi tugas dan wewenang kepada setiap jabatan yang berkenaan dengan prosedur perkreditan. Bagian yang terlibat dalam manajemen perkreditan disebut dengan komite kredit anggotanya terdiri dari *Account Officer*, *Analisis Credit*, *Credit Administration*, dan aparat pimpinan untuk pengambilan keputusan. Didalam komite kredit hal – hal yang di bicarakan adalah permohonan kredit ditinjau dari segala aspek. Dimana komite inilah yang menentukan apakah pemohon calon debitur dapat disetujui atau ditolak permohonan kreditnya.

3) Kebijakan Persetujuan Pemberian Kredit

Kebijakan pemberian kredit PT Bank BPR Dau Kusumadjaja Malang adalah menggunakan komponen – komponen sebagai berikut :

1. Konsep hubungan total perkreditan

Kebijakan persetujuan kredit harus didasarkan pada penilaian menyeluruh atas fasilitas kredit dimana di dalamnya termasuk kredit umum, pembelian SPBU, pembelian surat – surat berharga dan pemberian jaminan bank.

2. Penetapan batas wewenang perkreditan

Penetapan batas wewenang persetujuan kredit harus berupa keputusan direksi bank yang tertuang secara tertulis. Keputusan tersebut memuat wewenang dan tanggung jawab atas jumlah kredit. pada hal ini pihak bank BPR sudah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab atas jumlah kredit. hal ini dilakukan oleh komite kredit.

3. Tanggung jawab pejabat pemutus kredit

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal – hal berikut ini :

- a. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya.
- b. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat dan seksama (menggunakan prinsip 5C) serta *independent*. Pada hal ini pihak bank telah melaksanakan kebijakan persetujuan kredit dengan dasar analisis 5C yang

berperan penting dalam menganalisa karakter, kemampuan, dan modal nasabah yang akan diberikan kredit.

4. Proses persetujuan kredit

Proses persetujuan kredit harus berlangsung melalui beberapa tahap sesuai dengan pedoman yang tertulis pemberian kredit yang sehat.

Tahap persetujuan kredit adalah tahap berisi penilaian kredit dalam bentuk laporan disertai dengan rekomendasinya. Apabila dalam penilain kredit dinyatakan bahwa usaha yang diajukan tidak layak untuk dibiayai, maka akan segera dibuatkan disposisi penolakan permohonan kredit dalam bentuk tertulis. Namun apabila dalam penilaian kredit dinyatakan bahwa usaha tersebut layak untuk biayai, maka persetujuan dengan akad yang disebut perjanjian kredit yang berisi :

- a. Maksimum jumlah kredit
- b. Jangka waktu Kredit
- c. Keputusan Kredit
- d. Bea Materai
- e. Bentuk Kredit
- f. Cara penarikan dan pelunasan kredit
- g. Jaminan kredit
- h. Asuransi

5. Perjanjian kredit, bentuk dan format

Perjanjian kredit, bentuk dan format ditentukan oleh masing – masing bank dan dibuat secara tertulis. Setiap kredit yang disetujui dan

disepakati pemohon kredit harus dituangkan dalam perjanjian atau akad kredit secara tertulis.

6. Persetujuan pencairan kredit

Pada setiap pencairan kredit harus terjamin asas aman, terarah dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit. Pada tahap realisasi kredit apabila pemohon telah memenuhi syarat – syarat yang diperlukan seperti menyelesaikan surat bukti kepemilikan barang agunan, pengikatan barang yang dijadikan agunan serta menyelesaikan biaya perkreditan yang telah ditetapkan maka, tahap realisasi kredit dapat di lanjutkan

4) Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit adalah tindakan untuk menghindari resiko kemungkinan terjadinya penyimpangan yang akan timbul akibat proses pemberian kredit yang gagal. Pengawasan kredit PT. BPR Dau Kusumadjaja ditinjau berdasarkan kelancaran pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang dilakukan oleh debitur. Pada proses kredit sering terjadi proses penyimpangan yang di lakukan oleh debitur misalnya keterlambatan angsuran dan bunga pinjaman secara tepat waktu. Tindakan yang dilakukan pada pihak bank apabila terjadi penyimpangan adalah menghubungi nasabah melalui contact yang dituliskan pada data diri nasabah. Selama keterlambatan nasabah belum terkategori sebagai kredit macet maka sebisa mungkin akan dilakukan proses negosiasi.

Langkah – langkah dalam pengawasan kredit adalah :

- a. Mempersiapkan dokumentasi lengkap mengenai data diri nasabah
- b. Memonitor secara teratur dan kontinyu sehingga dapat mendeteksi secara dini bilamana ada masalah atau kemunduran usaha nasabah.
- c. Melakukan pembinaan dan mengawasi secara khusus pemberian kredit sesuai ketentuan bank Indonesia.
- d. Membuat laporan atas terjadinya penyimpangan kepada pimpinan bank.

5) **Penyelesaian Kredit bermasalah**

PT. Bank Dau Kusumadjaja mengklasifikasikan penyelesaian kredit bermasalah menjadi 4 kategori :

a. Kategori 1 (*collect 1*)

Kategori satu di peruntukkan bagi nasabah yang memiliki keterlambatan pembayaran angsuran 1- 3 kali. Ada beberapa aspek yang mendasari keterlambatan pembayaran angsuran nasabah yaitu, keterbatasan jarak dan waktu, itikat baik, dan terjadi suatu bencana alam. Pada aspek ini pihak bank mengambil solusi dengan menghubungi secara langsung kepada nasabah, mengenai alasan keterlambatan. Keterlambatan pada kategori pertama dapat di tolelir bank. Karena apabila nasabah terlambat 1 hari dalam angsuran, hal tersebut sudah dikategorikan sebagai kredit bermasalah. Solusinya adalah melalui *reschedulling* atau perpanjangan waktu pembayaran angsuran.

b. Kategori 2 (*collect 2*)

Kategori dua diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki keterlambatan 4 – 6 kali angsuran pembayaran pokok. Pada kategori ini sudah digolongkan sebagai kredit yang perlu mendapat perhatian. Langkah pertama penyelesaian kredit macetnya adalah dengan mendatangi nasabah bisa secara langsung maupun secara tidak langsung melalui telepon dan menanyakan penyebab keterlambatan pembayaran. Kemudian pihak bank mensurvey pendapatan sehari –hari nasabah. Kemudian mencoba memberikan solusi dengan memberikan kemudahan m-banking atau memberikan bukutabungan apabila kendalanya pada jarak dan waktu. Namun solusi kedua apabila karakter seseorang tersebut sedikit meragukan adalah kembali kepada cara pertama dengan cara *Reschedulling* atau perpanjangan waktu pembayaran angsuran. Solusi ketiga adalah melakukan *Reconditioning* yaitu dengan memberikan keringanan kepada debitur dengan melakukan penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan. *Reconditioning* biasanya banyak dilaksanakan kepada para petani yaitu dengan penundaan pembayaran bunga , yaitu bunga tetap dihitung namun pembayaran angsuran dilakukan

c. Kategori 3 (*collect 3*)

Kategori 3 diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki keterlambatan pembayaran 7 – 9 kali angsuran. Dianggap keterlambatan ini adalah masalah serius yang dapat menimbulkan kerugian pada bank. Maka

solusi pertama adalah melakukan konfirmasi kepada nasabah. Maka penyelesaian kredit bermasalah adalah dengan menawarkan jalan *Reconditioning* yaitu dengan penjadwalan kembali seluruh atau sebagian kredit yang diberikan. Solusi kedua adalah dengan memotong jumlah kredit yang diberikan misalnya kredit yang diberikan adalah sebesar Rp. 10.000.000 masalah dipotong 50% sehingga beban kredit nasabah adalah Rp. 5.000.000 kemudian lama angsuran tetap pada kesepakatan awal. Sehingga angsuran lebih rendah dari sebelumnya namun dengan jangka waktu yang sama. Kategori 3 biasanya banyak terjadi pada petani, karena pendapatan tiap hari yang terkadang belum pasti dan mengandalakan hasil panen. Apabila angsuran sudah jatuh tempo dan panen belum berhasil maka pihak nasabah menjadi tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Solusi dari pihak bank adalah memberikan penambahan waktu angsuran dimana bunga tetap berjalan tetapi angsuran bisa dibayar ketika panen berlangsung. Tentunya dengan pertimbangan dan survey oleh pihak bank. Di harapkan dengan langkah penyelesaian oleh pihak bank akan mengurangi kemungkinan kerugian yang akan dialami pihak bank.

d. Kategori 4 (*collect 4*)

Kategori 4 diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki keterlambatan 10 -12 kali angsuran. Kategori 4 merupakan kategori yang paling tidak dapat dipertahankan. Dimana pada kategori ini telah dilaksanakan

berbagai upaya penyelamatan. Hingga pada akhirnya harus dilakukan penyitaan jaminan agunan apabila nasabah tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk melunasi angsuran.

Langkah – langkah PT. BPR Dau Kusumadjaja dalam penyelesaian kredit bermasalah sebagai berikut :

a. Penjadwalan kembali (*Reschedulling*)

Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan memberikan perpanjangan pembayaran. Dimana mengubah sebagian atau seluruh kesepakatan yang semula disepakati oleh debitur dengan cara pihak bank memberikan perubahan jangka waktu atau perpanjangan waktu pembayaran angsuran pokok bunga kredit pada debitur. Pada kredit BPR dau kusumadjaja ada jenis kredit yang dengan angsuran dan tanpa angsuran. Untuk menghindari terjadinya kredit macet maka untuk kredit angsuran diberikan antara 6- 12 bulan. Dan untuk kredit dengan angsuran maksimal diberikan 3 tahun atau 36 kali. Pemberian lama angsuran di dasarkan atas proses analisa kredit dimana pihak bank sebisa mungkin tidak memberikan batas maksimal angsuran kredit agar dapat mengantisipasi kredit macet dan tidak menghambat prosedur umum yang sudah ditetapkan pihak bank.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Pada penyelesaian kredit dengan *Reconditioning* adalah dengan memberikan keringanan kepada debitur dengan melakukan penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan

dengan memperkecil pembayaran angsuran pokok dan bung kredit sehingga pelunasan kredit menjadi lebih lama

c. *Restructuring*

Langkah penyelamatan dengan jalan *restructuring* dilakukan dengan cara melakukan perubahan syarat – syarat kredit berupa pemberian tambahan kredit.

d. Penyitaan Jaminan kredit

Langkah penyelamatan dengan jalan penyitaan jaminan kredit adalah langkah terakhir yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah yang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi. Dimana hal ini meyangkut penyitaan jaminan kredit yang di sepakati pada awal perjanjian. Dimana barang agunan yang di jaminkan akan menjadi milik perusahaan yang selanjtnya agar berfungsi sebagai pengganti pelunasan kredit oleh nasabah.

C. Analisa dan Interpretasi Data

1. Perhitungan Rasio Keuangan

a. Pengukuran Efektivitas Kebijakan Kredit

1) Pengukuran efektivitas

Pengukuran efektifitas keuangan dilakukan berdasar hubunagn antara income dan outcome. Hal ini bertujuan menganalisis mengenai seberapa efektif nilai keuangan perusahaan yang dapat dijadikan acuan perusahaan. Semakin besar kontribusi realisasi maka semakin efektif perusahaan tersebut menjalan kegiatannya.

Tabel 6

*Efektivitas***PT. Bank BPR Dau Kusumadjaja Malang**

	2011 (Dalam Jutaan)	2012 (Dalam Jutaan)	2013 (Dalam Jutaan)
Realisasi	3.253.879.000	2.966.004.000	9.898.300.000
Target	4.181.240.000	3.543.600.000	17.510.321.000
<i>Efektivitas (%)</i>	78%	84%	56,5%

Sumber : Data Diolah

Berdasar data diatas dapat dianalisis bahwa pencapaian antara realisasi dan target pemberian kredit BPR Dau Kusumadjaja mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 tingkat efektivitas pemberian kredit sebesar 78% dari target yang di rencanakan. Menurut peraturan Menteri dalam negeri mengenai tingkat efektivitas keuangan hal ini berarti bahwa pemberian kredit BPR Dau pada tahun 2011 cukup efektif. Pada tahun 2012 pemberian kredit meningkat sebesar 84% yang dapat diartikan bahwa pemberian kredit dalam rentang cukup efektif. Pada tahun 2013 pemberian kredit BPR Dau kusumadjaja mengalami penurunan dengan nilai sebesar 56,5 % yang berarti menunjukkan pemberian kredit BPR Dau kusumadjaja tidak efektif. Terjadinya penurunan realisasi kredit pada tahun 2013 dikarenakan tingginya rencana kerja yang tidak diimbangi dengan pencapaian target yang berupa realisasi. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2013 pencapaian target sebesar 56,5 % yang berarti setengah dari target yang di rencanakan.

2) *Loan to Deposit Ratio*

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \text{Total Loans} / \text{Dana pihak ketiga} \times 100\%$$

Tabel 7
Loans to Deposit Ratio

PT. Bank BPR Dau Kusumadaja Malang

	2011 (Dalam Jutaan)	2012 (Dalam Jutaan)	2013 (Dalam Jutaan)
Total Loans	3.190.803	3.193.644	8.126.440
Dana Pihak Ketiga	4.903.344	5.145.055	11.665.248
LDR (%)	66,44%	63,23%	69,81%

Sumber : Data Diolah

Hasil analisis *Loan to Deposit Ratio* dari tahun 2011-2013 mengalami kondisi naik turun. Untuk tahun 2011 sebesar 66,19%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 63,23% dan meningkat menjadi 69,81 % pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank dalam menjamin pengembalian dana dari masyarakat yang digunakan untuk kredit masih belum efektif setiap tahunnya. Hal ini terjadi pada tahun 2011- 2012 dan pada tahun 2013 LDR mengalami kenaikan. Peraturan Bank Indonesia mengenai LDR yang efektif adalah sebesar 85 % - 110 %. Perubahan nilai LDR dapat kita manfaatkan untuk menilai seberapa besar profitabilitas yang diperoleh perbankan. Apabila nilai LDR rendah maka akan berdampak pada pendapatan profitabilitas yang kurang

maksimal. Namun apabila memenuhi standar Bank Indonesia maka kondisi bank akan dalam keadaan yang sehat dan efektif.

Peningkatan kemampuan bank dalam menjamin pengambalian kredit dari masyarakat yang digunakan untuk kredit pada setiap tahun disebabkan oleh meningkatnya jumlah deposit yang dihimpun oleh pihak bank yang bersangkutan. Jumlah deposit yang dihimpun oleh PT. Bank BPR Dau Kusumadajaja sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan kredit yang diberikan. Namun dalam skala yang lebih rendah dari peraturan Bank Indonesia yaitu 85%-110% sehingga pencapaian profitabilitas yang diperoleh belum maksimal.

2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR adalah perbandingan antara jumlah modal yang dimiliki suatu bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Semakin besar kredit yang disalurkan, maka semakin besar pula ATMR bank yang bersangkutan, sehingga CAR akan menurun.

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 8

Perhitungan ATMR PT. Bank BPR Dau Kusumadajaja Malang tahun 2011

Aktiva 2011	Bobot	Aktiva (Rp)	ATMR
Kas	0%	41.737	0
Antar bank	20%	719.860	143.972
Kredit yang diberikan	100%	/3.914.831	3.914.831

Aktiva tetap dan inventaris	100%	620.023	620.023
Akumulasi penyusutan	100%	489.573	489.573
Aktiva lain – lain	100%	910.503	910.503
Jumlah			5.589.329

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

$$= \frac{466.516}{5.589.329} \times 100\%$$

$$= 0,083 \times 100 \%$$

$$= 8,3 \%$$

Tabel 9

Perhitungan ATMR PT. Bank BPR Dau Kusumadaja Malang tahun 2012

Aktiva 2011	Bobot	Aktiva (Rp)	ATMR
Kas	0%	45.872	0
Antar bank	20%	1.040.082	208.096
Kredit yang diberikan	100%	3.193.644	3.193.644
Aktiva tetap dan inventaris	100%	531.758	531.758
Akumulasi penyusutan	100%	433.364	433.364
Aktiva lain – lain	100%	844.997	844.997
Jumlah			4.345.131

$$\begin{aligned}
 \text{CAR} &= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\% \\
 &= \frac{298.828}{4.345.131} \times 100\% \\
 &= 0,686 \times 100\% \\
 &= 6,86\%
 \end{aligned}$$

Tabel 10

Perhitungan ATMR PT. Bank BPR Dau Kusumadaja Malang tahun

2012

Aktiva 2011	Bobot	Aktiva (Rp)	ATMR
Kas	0%	33.249	0
Antar bank	20%	2.715.592	543.118
Kredit yang diberikan	100%	8.126.440	8.126.440
Aktiva tetap dan inventaris	100%	559.517	559.517
Akumulasi penyusutan	100%	416.876	416.876
Aktiva lain – lain	100%	620.791	620791
Jumlah			10.266.742

$$\begin{aligned}
 \text{CAR} &= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\% \\
 &= \frac{910.488}{10.266.742} \times 100\% \\
 &= 0,886 \times 100\% \\
 &= 8,8\%
 \end{aligned}$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *Capital Adequacy Ratio* mengalami kondisi naik turun setiap tahun. Terhitung mulai tahun 2011 CAR sebesar 8,3 %, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 6,86 % dan meningkat kembali sebesar 8,8 % pada tahun 2013. Artinya dengan adanya proses naik turun jumlah CAR setiap tahunnya menunjukkan bahwa penyaluran kredit pada PT.Bank BPR Dau Kusumadajaja mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat terlihat pada kenaikan jumlah ATMR. Karena semakin besar kredit yang disalurkan maka semakin besar pula ATMR bank yang bersangkutan, sehingga CAR akan menurun.

Pada Bank BPR Dau Kusumadajaja terlihat bahwa pada pada tahun 2012 penyediaan modal semakin menurun dan menimbulkan penyempitan penyediaan kredit yang dapat kita dari rendah nilai CAR yaitu sebesar 6,86 %. Pada tahun 2011 dan 2013 nilai CAR dapat dikatakan baik dan stabil karena penyediaan CAR minimal dari bank Indonesia adalah sebesar 8%. Namun penyediaan modal CAR yang dicapai PT. Bank BPR Dau Kusumadajaja belum efektif karena nilai yang dihasil belum stabil pada tiap tahunnya dengan rentang perbedaan nilai CAR yang cukup jauh.

b. Analisis Profitabilitas

1) Return of Asset

ROA adalah perbandingan rasio laba sebelum pajak (*earning before tax*) selama 12 bulan terakhir terhadap rata – rata volume usaha dan periode yang sama.

Tabel 11

Return of Assets

PT. Bank BPR dau Kusumadjaja Malang

	2011 (Dalam Ribuan)	2012 (Dalam Ribuan)	2013 (Dalam Ribuan)
<i>Earning Before Tax</i>	(320.082)	(167.687)	(223.862)
<i>Total aset</i>	4.903.344	5.144.055	11.699.515
Return of Asset (%)	(6,5)%	(3,2)%	(1,9)%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan perhitungan ROA diatas pada tahun 2011 nilai ROA sebesar -6,5%.

Pada tahun 2012 nilai ROA sebesar -3,2%. Kemudian pada tahun 2013 nilai ROA sebesar 1,9%. Melalui perhitungan tersebut maka nilai ROA pada BPR dau Kusumadjaja tidak efektif karena pada perhitungannya mendapatkan nilai negatif.

Hal itu berarti rasio laba terhadap volume usaha mengalami kerugian.

2) BOPO (Biaya operasional dan Pendapatan Operasional)

Perhitungan nilai Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan pendapatan operasional bank dalam melakukan kegiatan operasional. Semakin kecil nilai BOPO maka akan semakin efisien biaya operasional.

Tabel 12

Biaya Operasional Pendapatan Operasional

PT. Bank BPR dau Kusumadjaja Malang

	2011 (Dalam Ribuan)	2012 (Dalam Ribuan)	2013 (Dalam Ribuan)
Biaya operasional	1.510.204	1.189.143	1.219.917
Pendapatan Operasional	1.129.221	1.356.830	981.512

BOPO (%)	133%	124%	114%
-----------------	-------------	-------------	-------------

Sumber : data diolah

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan pada tahun 2011 pendapatan operasional BOPO sebesar 133%. Pada tahun 2012 pendapatan operasional adalah sebesar 124%. Kemudian tahun 2013 pendapatan operasional adalah sebesar 114%. Hal tersebut berarti bank BPR dau kusumadjaja tidak efisien untuk mengelola pendapatan operasional bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Karena nilai BOPO sesuai dengan standar bank Indonesia adalah sebesar 70%-80%.

3) *Net Profit Margin*

Ratio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui pendapatan operasional bank. Nilai NPM yang meningkat mengindikasikan bahwa bank menghasilkan profit lebih rendah dibandingkan dengan para kompetitor dalam tahun yang sama.

$$NPM = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

Tabel 13

Net Profit Margin

PT. Bank BPR dau Kusumadjaja Malang

	2011 (Dalam Jutaan)	2012 (Dalam Jutaan)	2013 (Dalam Jutaan)
<i>Net Income</i>	967.545	1.067.291	765.902
<i>Operating Income</i>	1.129.221	1.181.653	981.512
<i>Net Profit Margin(%)</i>	85,68 %	90,32 %	78 %

Sumber : Data Diolah

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *Net Profit* PT. Bank BPR Dau Kusumadjamengalami kenaikan dari 85,68 % pada tahun 2011 menjadi 90,32 %. Hal ini menunjukkan bank menghasilkan profit lebih rendah dari para kompetitornya melalui pendapatan operasional bank. Berbeda dengan nilai NPM yang menurun pada tahun 2012 dari 90,32 % menjadi 78% pada tahun 2012 dan tahun 2013. Dengan analisa tersebut menunjukkan bahwa bank menghasilkan profit lebih tinggi dengan para kompetitornya melalui pendapatan operasional bank. Hal tersebut dikarenakan peningkatan jumlah pendapatan bersih pada setiap tahunnya. Dan di imbangi dengan jumlah pendapatan operasional yang cukup stabil pada setiap tahun, sehingga menghasilkan nilai NPM yang seimbang pada tahun 2012 – 2013.

4) ROE (*Return of Equity*)

Rasio ini mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba setelah pajak berdasarkan modal yang di miliki.

$$ROE = \frac{\text{Net Income}}{\text{Equity Capital}} \times 100\%$$

Tabel 14

Return of Equity

PT. Bank BPR dau Kusumadaja Malang

	2011 (Dalam Ribuan)	2012 (Dalam Ribuan)	2013 (Dalam Ribuan)
<i>Earning After Tax</i>	(320.082)	(167.687)	(223.862)
<i>Total Equity</i>	466.516	298.828	910.488
<i>Return of Equity (%)</i>	(68%)	(56 %)	(24%)

Sumber : Data Diolah

Return of equity digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri dalam memperoleh keuntungan bersih bank. Prosentase ROE pada PT. Bank BPR Dau Kusumadjaja Malang mengalami kondisi yang berfluktuasi secara naik turun dalam setiap periode. Pada tahun 2011 sebesar 68 % dan mengalami penurunan menjadi 56 % pada tahun 2012 dan 24 % pada tahun 2013. Dalam hal ini PT. BPR Dau Kusumadjaja mengalami kerugian pada faktor laba rugi sehingga menyebabkan nilai EAT menjadi negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT. BPR Dau Kusumadjaja belum efektif dalam menghasilkan laba bersih bagi perusahaan. Hal ini dapat terlihat dengan rendahnya nilai *ROE* pada pihak bank. Padahal semakin tinggi *ROE* yang dihasilkan maka semakin baik produktifitas modal sendiri dalam memperoleh laba.

5) *Gross Profit Margin*

Gross Profit Margin (GPM) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menghitung laba operasi melalui pendapatan operasional yang dihasilkan. Persentase *GPM* semakin besar, maka semakin baik keadaan operasional bank. Berikut rumus menghitung *Gross Profit Margin* ;

$$GPM = \frac{\text{Operating Income} - \text{Operating Expense}}{\text{Operating Income}} \times 100$$

Tabel 15

*Gross Profit Margin***PT.Bank BPR Dau Malang, Tbk**

	2011 (Dalam Ribuan)	2012 (Dalam Ribuan)	2013 (Dalam Ribuan)
<i>(Operating Income – Operating expense)</i>	1.129.221-	1.181.653-	981.512 -
<i>Operating Income</i>	1.510.204	1.356.718	1.219917
<i>GPM (%)</i>	33,7 %	14,8 %	24 %

Sumber : Data Diolah

Presentase GPM PT. Bank BPR Dau Kusumadjaja Malang pada setiap tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sebesar 33,7 % yang kemudian menurun secara signifikan sehingga menjadi 14,8 % pada tahun 2012. Kemudian meningkat kembali menjadi 24 % pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan jumlah beban operasional bank lebih besar dibandingkan dengan pendapatan operasional bank. Dengan demikian nilai perhitungan GPM pada PT. Bank BPR Dau Kusumadjaja semakin kecil pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 24 % hal ini tentu melegakan melihat pada tahun 2012 nilai GPM pada bank bisa dikatakan cukup rendah.

Berdasar hasil perhitungan *Gross Profit Margin* PT. Bank BPR Dau Kusumadjaja kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari operasional usahanya dapat dikatakan belum efektif.

6) *Net Income Total Asset*

Net Income Total Asset bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dana manajerial efisiensi secara keseluruhan. *Net Income Total Asset* dapat ditentukan dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak (*net income*) dengan total aset yang dimiliki perusahaan. *Net Income total Asset* secara matematis dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Net Income Total Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Tabel 16

*Net Income Total Asset***PT. Bank BPR Dau Kusumadjaja Malang**

	2011 (Dalam Ribuan)	2012 (Dalam Ribuan)	2013 (Dalam Ribuan)
<i>Net Income</i>	(320.082)	(167.687)	(233.784)
<i>Total Asset</i>	4.903.344	5.144.055	11.699.515
<i>Net Income total Asset (%)</i>	6,52%	3,25 %	1,99%

Sumber : Data Diolah

Berdasar perhitungan *Net Income total asset*, setiap tahun BPR mengalami penurunan nilai dan prosentase dimana pada tahun 2011 sebesar 6,52 % kemudian menurun menjadi 3,25 % pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1,99 %. Hal ini berarti kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas belum efektif.

7) *Rate Return on Loans*

Adalah kemampuan mengukur manajemen dalam mengelola kegiatan kredit dengan cara membandingkan pendapatan bunga dan total kredit yang diberikan.

$$\text{Rate Return on Loans} = \frac{\text{Interest Income}}{\text{Total Loans}} \times 100\%$$

Tabel 17

Rate Return on Loans
PT. Bank BPR Dau Kusumadjaja Malang

	2011 (Dalam Ribuan)	2012 (Dalam Ribuan)	2013 (Dalam Ribuan)
<i>Interest Income</i>	967.545	1.067.291	1.299.327
<i>Total Loans</i>	3.914.831	3.193.644	8.126.440
<i>Net Income total Asset (%)</i>	24%	33,4 %	15,9 %

Sumber : Data Diolah

Berdasar perhitungan *Rate Return on Loans* Bank BPR Dau Kusumadjaja mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2011 nilainya sebesar 24% kemudian meningkat menjadi 33,4% pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 15,9%. Terjadinya penurunan nilai *Rate Return on Loans* pada tahun 2013 dikarenakan jumlah pinjaman yang diberikan jauh lebih besar dibandingkan pendapatan bunga pada bank BPR Dau Kusumadjaja Malang.

Berdasarkan perhitungan rasio keuangan bank, dapat kita ketahui bahwa bank memiliki pengelolaan kredit belum efektif. Pihak bank belum mencapai realisasi penyaluran kredit sesuai dengan rencana kerja atau target bank yang telah ditentukan. Hal ini dapat kita simpulkan melalui perhitungan efektifitas kinerja

keuangan BPR pada tahun 2011 sebesar 78% dan pada tahun 2012 mencapai 84%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas kinerja keuangan dalam penyaluran kredit berada pada rentan cukup efektif. Kemudian pada tahun 2013 BPR Dau Kusumadaja mengalami penurunan menjadi 56,5% persen sehingga berada dalam rentan tidak efektif. Pihak bank belum optimal dalam merealisasikan target yang di rencanakan bank untuk menunjang profitabilitas perusahaan. Hal ini dapat tercermin pada *Loans Deposite Ratio* yang masih dibawah standar Bank Indonesia yaitu 85% - 110%, namun pada PT. BPR Dau Kusumadaja pada setiap tahunnya mencapai angka 60 – 70 %. Pencapaian tersebut dapat menunjukan bahwa kebijakan kredit pada PT. Bank Dau Kusumadaja belum memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia dimana nilai LDR yang dapat dikategorikan sehat dan efektif adalah sebesar 85% - 110%. Peningkatan nilai LDR dapat mempengaruhi profitabilitas yang diterima oleh perbankan. Apabila LDR mengalami kenaikan berarti pendapatan juga mengalami kenaikan, diikuti dengan kenaikan nilai ROA dan penurunan nilai BOPO. Apabila nilai LDR rendah maka profitabilitas yang akan diterima oleh pihak bank juga dalam posisi yang belum maksimal. Hal ini dapat kita simpulkan pada hasil laporan keuangan yang menunjukkan laba rugi pertahun yang selalu mendapat angka minus. Hal ini terjadi karena kurang optimalnya manajemen dalam mengelola kredit dan profitabilitas. Hal ini dapat tercermin pada *Rate return on Loans* yang semakin menurun. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan pada aspek likuiditas, hal ini dikarenakan minat dan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada BPR. Pada sisi profitabilitasnya cenderung mengalami

fluktuasi. *Gross Profit Margin* dan ROE mengalami fluktuasi sedangkan NPM dan *Rate Return on Loans* cenderung mengalami fluktuasi. Terjadinya fluktuasi diakibatkan karena terjadinya kredit bermasalah karena kredit yang diberikan tidak kembali pada waktunya. Serta tingginya beban operasional perusahaan yang tidak senada dengan pendapatan operasionalnya. Pendapatan operasional perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan beban operasional perusahaan sehingga hal ini sangat berpengaruh pada profitabilitas perusahaan.

2. Cara meningkatkan profitabilitas

Cara meningkatkan profitabilitas bank BPR DAU Kusumadjaja adalah melalui pendekatan regulasi. Pendekatan rencana kredit ini didasarkan pada regulasi moneter dan perbankan. Tugas manajemen bank adalah menyesuaikan dan menyikapinya melalui antisipasi terhadap regulasi tersebut. Regulasi yang berkaitan dengan perkreditan umumnya akan berpengaruh pada biaya dana, lending rate, alokasi kredit, ekspansi/volume kredit dan likuiditas bank.

a. Menentukan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) atau *LLL (Legal Lending Limit)*

BMPK adalah limit atau batas maksimal pemberian kredit yang boleh diberikan suatu bank kepada calon debitur individual dan atau debitur terkait dengan kelompok atau grup usaha bank yang bersangkutan. BMPK yang efektif berlaku saat ini adalah:

- Untuk debitur individual sebesar 20% dari modal bank yang bersangkutan.

- Untuk debitur yang terkait atau berasal dari kelompok usahanya sebesar 25% dari modal bank

Tabel 18

**Batas Maksimum Pemberian Kredit
PT. Bank BPR Dau Kusumadajaja Malang**

	2011 (Dalam Ribuan)	2012 (Dalam Ribuan)	2013 (Dalam Ribuan)
Jumlah Modal Bank	466.516	298.828	910.488
BMPK Individu (20%)	93.303	59.765	182.097
BMPK Kelompok (25%)	116.629	74.707	227.622

Sumber : Data Diolah

Perhitungan data di atas dimaksudkan untuk membantu perusahaan dalam mengantisipasi atau berhati – hati terhadap batas penyaluran kredit. BMPK pada tahun 2011 untuk individu adalah 93.303 dan untuk kelompok 116.629. kemudian pada tahun 2012 individu 59.765 dan kelompok 74.707. Pada tahun 2013 BMPK tahun 2013 untuk individu sebesar 182.097 dan kelompok 227.662. pembatasan pemberian kredit diperlukan sebagai upaya perusahaan dalam rangka melaksanakan prinsip kehati – hatian bank terhadap nasabah. Tanpa adanya pembatasan, bisa terjadi kredit yang disalurkan kepada satau atau beberapa debitur dengan masing – masing dengan jumlah yang tingi maka akan menimbulkan resiko kredit macet yang tinggi.

- Menentukan Volume Kredit yang efektif berdasar perhitungan LDR

Hal yang diperlukan untuk menentukan volume kredit berdasarkan LDR yaitu data mengenai dana pihak ke III dan modal sendiri. Dana pihak ketiga

merupakan dana yang dapat dihimpun dari masyarakat misalnya tabungan dan deposito dan simpanan lainnya. Berikut rumus penambahan volume kredit agar dapat meningkatkan profitabilitas :

$$\text{Loan Deposite Ratio} = \frac{\text{Jumlah kredit awal} + \text{Tambahan Netto}}{\text{Dana Pihak ketiga} + \text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 19
Tambahan Ekpansi Kredit
PT. Bank BPR Dau Kusumadjaja Malang

	2011 (Dalam Ribuan)	2012 (Dalam Ribuan)	2013 (Dalam Ribuan)
Jumlah kredit awal	3.190.803	3.193.644	8.126.440
DPK + Modal Sendiri	4.093.344	4.373.296	11.665.248
<i>Loan Deposite Ratio</i> <i>sebelum</i>	66,44%	62,07%	69%
<i>LDR (BI)</i>	85%	85%	85%
<i>Tambahan Ekpansi Kredit</i>	977.039	1.179.652	1.789.020

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan profitabilitas suatu perbankan maka akan di lakukan penambahan ekspansi kredit sebesar 977.039 pada tahun 2011, 1.179.652 pada tahun 2012 dan 1.789.020 pada tahun 2013. Penambahan ekspansi kredit ini sesuai dengan peraturan bank Indonesia berdasar pada ketentuan LDR yaitu sebesar 85%-110%. Dengan adanya penambahan ekspansi kredit maka meningkatkan profitabilitas perbankan.

Tabel 20
Pembaharuan Kredit Yang Usulkan
PT. Bank BPR Dau Kusumadajaja Malang

	2011 (Dalam Ribuan)	2012 (Dalam Ribuan)	2013 (Dalam Ribuan)
Jumlah kredit awal	3.190.803	3.193.644	8.126.440
Jumlah ekspansi kredit	977.039	1.179.652	1.785.020
Jumlah kredit yang diusulkan	4.167.039	4.373.296	9.911.460

Sumber : Data Diolah

Berdasar data pembaharuan kredit yang diberikan dapat disimpulkan bahwa kemampuan bank apabila menambahkan ekspansi kredit pada setiap tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada dasarnya perbankan selalu berpedoman kepada laporan keuangan untuk merencanakan kreditnya. Kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dapat tercermin pada tabel apabila sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Pada tahun 2011 pembaharuan jumlah kredit lebih besar dibanding jumlah dana pihak ketiga dan modal yang dimiliki perbankan sehingga apabila perbankan menambah ekspansi kredit sebesar 18,56% dikhawatirkan bank akan mengalami kerugian. Kemudian pada tahun 2012 apabila pihak bank menambah ekspansi kredit sebesar 22,93% jumlah dana pihak ketiga dan modal bank cukup untuk memenuhi permintaan kredit namun sangat rentan dan mengkhawatirkan. Pada tahun 2013 jumlah dana pihak ketiga adalah sebesar 11.665.248, apabila pihak bank menambah ekspansi kredit sebesar 16% maka pembaharuan penyaluran kredit adalah sebesar 9.911.460. Melalui DPK dan modal yang dimiliki sangat memungkinkan pihak bank untuk

menambah ekspansi kredit yang dimiliki. Melalui kebijakan tersebut maka diharapkan pada tahun 2014 akan menambah jumlah ekspansi kredit. Melalui penambahan ekspansi kredit maka akan menambah pendapatan dan tingkat suku bunga suatu bank sehingga profitabilitas perbankan akan mengalami kenaikan

c. Meningkatkan Modal Bank melalui perhitungan CAR

CAR adalah perbandingan antara jumlah modal yang dimiliki suatu bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Perluasan atau ekspansi kredit erat kaitannya dengan modal yang dimiliki oleh pihak bank. Apabila CAR nya terbatas maka hal tersebut harus diimbangi dengan penambahan modal. Menurut peraturan BI nilai minimum CAR adalah 8%. Berikut rumus penambahan Modal melalui perhitungan CAR agar dapat meningkatkan profitabilitas melalui ekspansi kredit :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Sendiri} + \text{Modal Tambahan}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 21

Tambahan Modal Bank

PT. Bank BPR Dau Kusumadajaja Malang

	2011 (Dalam Ribuan)	2012 (Dalam Ribuan)	2013 (Dalam Ribuan)
Jumlah Modal awal	466.516	298.828	910.488
ATMR	6.566.368	4.373.329	13.450.268
<i>CAR yang diusulkan</i>	20%	20%	20%
<i>Tambahan Modal</i>	846.761	575.831	2.690.053
<i>Tambahan Modal bank yang diusulkan</i>	1.313.077	874.659	3.600.541

Sumber : Data Diolah

Pada tahun 2011 jumlah CAR sudah mencapai angka 8% namun nilai tersebut adalah nilai batas sehingga akan rentang mengalami risiko. Nilai CAR yang diusulkan adalah 20% maka usulan penambahan modal adalah 846.761. kemudian pada tahun 2012 Nilai CAR yang diusulkan adalah 20% maka usulan penambahan modal adalah 575.831. pada tahun 2013 Nilai CAR yang diusulkan adalah 20% maka usulan penambahan modalnya adalah 2.690.053.

Berdasar perhitungan modal diatas adanya penambahan modal sangat erat kaitannya dengan upaya penambahan ekspansi kredit. Apabila jumlah kredit yang diberikan bank lebih besar maka jumlah ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Rasio) juga semakin besar sehingga nilai CAR akan semakin kecil. Maka dari itu apabila ingin menambah ekspansi kredit sesuai dengan standar BI sebesar 8% maka harus dipertimbangkan modal yang dimiliki bank melalui perluasan tabungan dan deposito.

d. Meningkatkan nilai ROE melalui penambahan usulan penambahan modal

ROE adalah kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba setelah pajak berdasarkan modal yang dimiliki. Semakin tinggi ROE menunjukkan kemampuan modal yang efektif dalam menghasilkan laba yang dihitung setelah dikurangi pajak.

Tabel 21

Return of Equity

PT. Bank BPR dau Kusumadjaja Malang

	2011 (Dalam Ribuan)	2012 (Dalam Ribuan)	2013 (Dalam Ribuan)
<i>Earning After Tax</i>	(320.082)	(167.687)	(223.862)

<i>Usulan Total Equity</i>	1.313.077	874.659	3.600.541
<i>Return of Equity (%)</i>	(24%)	(19%)	(6%)

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa melalui usulan ekuitas atau modal yang baru dapat menambah profitabilitas dalam ha ini *Return Of Equity*. melalui penambahan modal baru maka ROE perlahan mengalami kenaikan meskipun masih dalam sisi negatif. Hal tentunya baik adanya karena dengan penambahan modal maka kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba setelah pajak berdasarkan modal yan di miliki semakin meningkat.

- e. Menstabilkan Nilai BOPO sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Perhitungan nilai Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional bertujuan untuk mengukur tingkat efesiensi dan kemampuan pendapatan operasional bank dalam melakukan kegiatan operasional. Semakin kecil nilai BOPO maka akan semakin efisien biaya operasional. Berikut usulan nilai pendapatan operasional berdasarkan melalui perhitungan BOPO :

Tabel 23

**Usulan Biaya Operasional Pendapatan Operasional
PT. Bank BPR dau Kusumadaja Malang**

	2011 (Dalam Ribuan)	2012 (Dalam Ribuan)	2013 (Dalam Ribuan)
Biaya operasional	1.510.204	1.189.143	1.219.917
Pendapatan Operasional	1.129.221	1.356.830	981.512
Usulan Pendapatan Operasional	1.887.755	1.486.428	1.524.896
BOPO (BI) (%)	80%	80%	80%

Sumber : data diolah

Melalui perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa melalui peraturan Bank Indonesia dapat meningkatkan kemampuan pendapatan operasional bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Pada tahun 2011 usulan pendapatan operasional sesuai perhitungan BOPO sebesar 80% adalah 1.887.755. Pada tahun 2012 usulan pendapatan operasional adalah sebesar 1.486.428. Kemudian tahun 2013 usulan pendapatan operasional adalah sebesar 1.524.896. Diharapkan dengan adanya perencanaan tersebut dapat menjadikan acuan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola profitabilitas.

f. Meningkatkan *Return Of assets* melalui peraturan Bank Indonesia.

ROA adalah perbandingan rasio laba sebelum pajak (*earning before tax*) selama 12 bulan terakhir terhadap rata – rata volume usaha dan periode yang sama.

Tabel 24
Return of Asset

PT. Bank BPR dan Kusumadaja Malang

	2011 (Dalam Ribuan)	2012 (Dalam Ribuan)	2013 (Dalam Ribuan)
<i>Earning Before Tax</i>	438.452	137.088	319.522
<i>Total aset</i>	4.903.344	5.144.055	11.699.515
<i>Return of Asset (%)</i>	8,9%	2,6%	2,7%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan perhitungan ROA diatas melalui pendekatan regulasi sesuai standar BI maka nilai ROA akan meningkat dan dalam kategori sehat. Pada tahun 2011 nilai ROA sebesar 8,9%. Pada tahun 2012 nilai ROA sebesar 2,6%. Pada tahun

2013 nilai ROA sebesar 2,7%. Melalui perhitungan tersebut maka nilai ROA akan sesuai dengan standar bank Indonesia yaitu lebih besar dari 2 %.

Melalui perhitungan peningkatan kredit dapat disimpulkan bahwa kebijakan kredit yang efektif dapat meningkatkan profitabilitas. Melalui pendekatan regulasi pemerintah dalam hal ini peraturan BI maka kebijakan kredit berupa LDR, CAR yang efektif dapat meningkatkan profitabilitas dengan cara. Meningkatkan volume kredit dan penambahan modal. Dengan 2 aspek tersebut maka dalam sisi perhitungan rasio baik, profitabilitas maupun pengelolaan atau manajemen akan meningkat karena bank mengelola keuangan yang efektif dan sesuai dengan peraturan pemerintah.

2. Analisis Kebijakan Kredit

Analisis kebijakan kredit bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Dau Kusumadaja Malang sesuai dengan kriteria kebijakan yang baik ataukah belum. Secara keseluruhan penerapan kebijakan kredit secara prosedural sudah berjalan dengan baik. Namun hal ini belum bisa dikatakan efektif.

a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan

Pada Prinsip kehati-hatian – hatian selayaknya sudah diterapkan dengan semestinya oleh pihak bank. Namun beberapa faktor yang berhubungan dengan perjanjian kredit seperti pembayaran angsuran yang sering menjadi kendala pada bank, sehingga mempengaruhi hasil dari profitabilitas perusahaan. Berikut item yang diterapkan pada Bank BPR Dau Kusumadaja Malang mengenai prinsip kehati-hatian :

- Menentukan batas maksimal pinjaman
- Menentukan plafond masing – masing kredit
- Menentukan prosedur pemberian kredit
- Menentukan jenis usaha yang tidak diperkenankan untuk diberikan pinjaman

Namun pada prakteknya PT. BPR Dau Kusumadaja juga mengalami kesulitan dalam mempertahankan prinsip kehati – hatian. Antara lain :

- Tidak memisahkan pejabat atau bagian yang menangani kredit lancar kredit macet kredit bermasalah.
- Pengawasan kredit kurang ketat karena banyak kredit macet.
- Meneliti jenis agunan yang marketable
- Jenis agunan yang resmi dan kompeten

b. Organisasi dan manajemen kredit

Organisasi dan manajemen kredit PT. Bank BPR Dau Kusumadaja telah berjalan dengan efektif dan diterapkan sesuai dengan tanggung jawab masing – masing bagian. Pada setiap unit kerja ada pembagian wewenang yang masing – masing bagian berperan penting dalam pengambilan keputusan kredit. Bagian yang terlibat dalam organisasi dan manajemen kredit adalah Direksi, Kepala Bagian Operasional, Bagian Umum, Bagian Kredit yang terdiri dari Marketing dan Administrasi kredit dan Kasi kredit. Pada masing – masing bagian telah melaksanakan tugas manajemennya dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang diterapkan di BPR dau Kusumadaja.

c. Kebijakan persetujuan kredit

Kebijakan persetujuan telah dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur yang diterapkan pihak bank. Kebijakan persetujuan kredit pada PT. Bank Dau Kusumadaja mencakup beberapa komponen yaitu konsep hubungan total perkreditan, penetapan batas wewenang, tanggung jawab pemutus pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit, persetujuan pencairan kredit. Komponen – komponen ini selayaknya sudah berjalan dengan baik. Namun ada tahapan yang perlu mendapatkan evaluasi dan mengadakan pembaharuan terhadap tahapan tersebut. Pada tahapan tanggung jawab pemutus kredit diharapkan pihak bank lebih teliti dalam memahami karakter dan watak seseorang akan lebih baik lagi apabila pihak bank mengetahui kebutuhan, baik sekunder maupun primer dan gaya hidupnya sehingga analisis kredit dapat lebih maksimal dalam memahami karakter pemohon. Pada dasarnya sering terjadinya kredit bermasalah adalah dikarenakan Pemahaman Karakter yang kurang dan kapasitas dari nasabah. Kapasitas dari nasabah sangat diperlukan pihak bank agar pada proses selanjutnya nasabah mampu melunasi pembayaran dan angsuran yang semestinya menjadi tanggung jawab nasabah. Karena pada kasus – kasus sebelumnya banyak sekali kendala yang diterima bank berkaitan dengan dua spek tersebut yaitu aspek karakter dan kapasitas. Berkenaan dengan aspek –aspek lainnya seperti Collateral, Condition dan Capital dapat di usahakan solusi terbaik melalui musyawarah bersama nasabah.

d. Dokumentasi dan administrasi

Dokumentasi dan administrasi kredit yang dilakukan bank sudah baik. Dokumen – dokumen yang menjadi syarat bank sudah dilaksanakan secara tertib dan rapi. Administrasi dokumen bertujuan untuk mendukung penilaian atas perkembangan kredit atau usaha nasabah dan pengawasan kredit sehingga kepentingan bank dapat terlindungi

e. Pengawasan kredit

PT. BPR Dau Kusumadjaja sudah melaksanakan pengawasan terhadap nasabah secara baik. Hal ini didasarkan pada kelancaran pembayaran angsuran. Apabila pihak nasabah memiliki kendala terhadap pembayaran angsuran maka pihak bank mengawasi keberlanjutan nasabah dalam memenuhi tanggung jawabnya.

f. Penyelesaian kredit bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan PT. Bank Dau Kusumadjaja sudah baik yaitu dengan menetapkan 4 kategori penyelesaian kredit yaitu, *collect 1*, *collect 2*, *collect 3*, *collect 4*. Hal ini sudah sangat efektif karena pihak langsung menanggulangi dan mengawasi kelancaran pembayaran nasabah. Pihak bank juga menggunakan cara penyelesaian berupa *reschedulling*, *reconditioning*, *restrukturisasi*, dan penyitaan jaminan dengan sangat tepat pada kondisi nasabah.

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. PT. BPR Dau Kusumadjaja telah menerapkan kebijakan kredit baik tetapi belum efektif. Pada penerapan kebijakan kreditnya PT. BPR dau Kusumadjaja menerapkan kebijakan umum perihal :

- a. Prinsip Kehati – hatian,

Prinsip kehati – hatian sudah dilaksanakan dengan baik tetapi belum efektif. Pihak bank sudah melaksanakan prinsip kehatia – hatian sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yaitu dengan memberikan prosedur umum perkreditan, memberikan plafond kredit, dan jenis usaha yang layak diberikan kredit. Namun ada beberapa aspek yang menjadikan prinsip kehati – hatian kurang sempurna yaitu terletak pada kemampuan pihak nasabah dalam memenuhi tanggung jawabnya yang sering mengalami kendala. Sehingga membuat pihak bank perlu melakukan evaluasi pada prinsip kehati – hatian yang diterapkan.

- b. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

Organisasi dan manajemen yang dilaksanakan PT. BPR Dau Kusumadjaja berjalan dengan efektif dan diterapkan sesuai dengan tanggung jawab masing – masing bagian. Pada setiap unit kerja ada

pembagian wewenang yang masing – masing bagian berperan penting dalam pengambilan keputusan kredit. Bagian yang terlibat dalam organisasi dan manajemen kredit adalah Direksi, Kepala Bagian Operasional, Bagian Umum, Bagian Kredit yang terdiri dari Marketing dan Administrasi kredit dan Kasi kredit

c. Kebijakan Persetujuan Kredit

Kebijakan persetujuan kredit telah dilaksanakan PT. Bank BPR Dau Kusumadajaja dengan baik dan efektif. Pihak bank telah melaksanakan langkah – langkah kebijakan persetujuan kredit sesuai dengan prosedur yang di terapkan pihak bank. Kebijakan persetujuan kredit pada PT. Bank Dau Kusumadajaja mencakup beberapa komponen yaitu konsep hubungan total perkreditan, penetapan batas wewenang, tanggung jawab pemutus pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit, persetujuan pencairan kredit. Pada kebijakan persetujuan kredit lebih ditekankan pada aspek analisa kredit kepada nasabah menggunakan aspek 5C.

d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Dokumentasi dan administrasi kredit yang dilaksnakan pada PT. BPR Dau Kusumadajaja sudahk berjalan dengan baik dan efektif. Hal – hal mengenai persyaratan dan lampiran kebutuhan nasabah sudah tertata secara tertib dan rapi. Sehingga tidak menyulitkan pihak bank dalam menemukan identitas dan kebutuhan nasabah.

e. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit telah dilaksanakan PT. Bank Dau Kusumadaja dengan baik dan efektif. Pengawasan kredit dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kelancaran pembayaran nasabah. Sehingga pihak bank dapat mengantisipasi secara tepat terhadap kendala yang dialami nasabah.

f. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPR Dau Kusumadaja sudah berjalan baik dan efektif. Pihak bank sudah melaksanakan penanggulangan terhadap kredit macet dengan 4 kategori kredit yang di terapkan yaitu, *Collect 1* dengan keterlambatan pembayaran angsuran sebanyak 1-3 kali, *Collect 2* dengan keterlambatan pembayaran sebesar 4-6 kali, *Collect 3* dengan keterlambatan sebesar 7-9 kali, *Collect 4* dengan keterlambatan pembayaran angsuran 10-12 kali. penyelesaian ke empat kategori tersebut menggunakan cara *reschedulling*, *reconditioning*, *restrukturisasi*, dan penyitaan jaminan dengan sangat tepat pada kondisi nasabah.

2. Efektivitas kebijakan kredit PT. Bank BPR Dau Kusumadaja menggunakan rasio keuangan.

Berdasarkan perhitungan rasio keuangan bank, dapat kita ketahui bahwa bank memiliki pengelolaan kredit belum efektif. Pihak bank belum mencapai realisasi penyaluran kredit sesuai dengan rencana kerja atau target bank yang telah ditentukan. Hal ini dapat kita

simpulkan melalui perhitungan efektifitas kinerja keuangan BPR pada tahun 2011 sebesar 78% dan pada tahun 2012 mencapai 84 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas kinerja keuangan dalam penyaluran kredit berada pada rentan cukup efektif. Kemudian pada tahun 2013 BPR Dau Kusumadaja mengalami penurunan menjadi 56,5% persen sehingga berada dalam rentan tidak efektif. Pihak bank belum optimal dalam merealisasikan target yang di rencanakan bank untuk menunjang profitabilitas perusahaan. Hal ini dapat tercermin pada *Loans Deposite Ratio* yang masih dibawah standar Bank Indonesia yaitu 85% - 110%, namun pada PT. BPR Dau Kusumadaja pada setiap tahunnya mencapai angka 60 – 70 %. Pencapaian tersebut dapat menunjukan bahwa kebijakan kredit pada PT. Bank Dau Kusumadaja belum memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia dimana nilai LDR yang dapat dikategorikan sehat dan efektif adalah sebesar 85% - 110%. Peningkatan nilai LDR dapat mempengaruhi profitabilitas yang diterima oleh perbankan. Apabila nilai LDR rendah maka profitabilitas yang akan diterima oleh pihak bank juga dalam posisi yang belum maksimal. Hal ini dapat kita simpulkan pada hasil laporan keuangan dapat kita lihat laba rugi pertahun yang selalu mendapat angka minus. Hal ini terjadi karena kurang optimalnya manajemen dalam mengelola kredit dan profitabilitas. Hal ini dapat tercermin pada *Rate return on Loans* yang semakin menurun. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan pada aspek

likuiditas, hal ini dikarenakan minat dan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada BPR.

Pada sisi profitabilitasnya cenderung mengalami fluktuasi. *Gross Profit Margin* dan ROE mengalami fluktuasi sedangkan NPM dan *Rate Return on Loans* cenderung mengalami fluktuasi. Terjadinya fluktuasi diakibatkan karena terjadinya kredit bermasalah karena kredit yang diberikan tidak kembali pada waktunya. Serta tingginya beban operasional perusahaan yang tidak senada dengan pendapatan operasionalnya. Pendapatan operasional perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan beban operasional perusahaan sehingga hal ini sangat berpengaruh pada profitabilitas perusahaan.

Pada sisi cara peningkatan kebijakan kredit dapat disimpulkan bahwa dengan kebijakan perkreditan yang efektif sesuai dengan regulasi pemerintah, dalam ini peraturan BI. Kebijakan kredit dapat meningkatkan profitabilitas. Yaitu melalui penambahan ekspansi kredit atau volume kredit dan penambahan modal bank.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Diharapkan manajemen PT. Bank BPR Dau Kusumadjaja lebih meningkatkan dalam menghimpun dana pihak ketiga yang terdiri dari deposito dan tabungan untuk kemudian diikuti dengan kebijakan peningkatan kredit yang disalurkan kepada masyarakat sehingga LDR

dapat meningkat. Dengan meningkatnya LDR maka akan diperoleh pendapatan operasional yang baik untuk meningkatkan profitabilitas.

2. Menetapkan suatu cadangan lain selain kas yang besar supaya cadangan dana untuk bank cukup sewaktu – waktu diperlukan seperti penempatan dana pada produk yang likuid.
3. Untuk Manajemen bank diharapkan lebih meningkatkan penelitian dan menerapkan prinsip kehati – hatian dalam menilai calon nasabah. Hal ini berkaitan dengan tingginya nilai NPL dan memperhatikan kualitas kredit yang diberikan supaya tidak menjadi kredit yang bermasalah sehingga dapat memperoleh keuntungan dari kredit yang disalurkan.
4. Meningkatkan jumlah penyaluran atau realisasi kredit agar dapat meningkatkan profitabilitas bank. Peningkatan jumlah penyaluran kredit dapat di laksanakan melalui pemasaran yang intens dan penyuluhan – penyuluhan kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal. 2005. *Manajemen Perbankan: Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank*. Malang: UMM Pers.
- Abdurahmat, 2003. Pengertian tentang efektifitas, (online), Tersedia: http://othenk.blogspot.com/2013_2013_12_24_achieve.html. diakses tanggal 20 Februari 2013.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Manajemen penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Firdaus, H. Rahmat dan Maya Ariyanti. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- I Wayan Sudirman, 2000. *Manajemen perbankan Suatu Aplikasi Dasar*. Denpasar : PT.BP
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Edisi revisi. Cetakan kesembilan. Jakarta; Rajawali Pres
- Ktut Silvanita. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Erlangga: Jakarta
- Kusnadi dkk. 2002. *Akuntansi Manajemen (Komprehensif, Tradisional dan Kontemporer)*. Universitas Brawijaya
- Malayu, Hasibuan. 2004. *Dasar – Dasar Perbankan Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mahmoeddin, Drs.H.A. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta : Pustakan Sinar Harapan
- Muchdarsyah Sinungan. 2000. *Managemenn Dana Bank. Edisi 2*, Jakarta : Bumi Aksara
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Makmur, Syarif (2008) *Pemberdayaan Sumber daya Manusia dan Efektivitas organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- O.P Simorangkir. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia
- Peraturan BI Nomor 7/2/PBI/2005

Pedoman Penyusunan kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) dalam Suyatno (2003:186-204) . *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sudirma, Wayan. Drs. 2002. *Manajemen Perbankan*. Edisi 1. Denpasar : PT BP Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan (edisi lima)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Indonesia

Sugiyono.1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung :ALFABETA

Sutojo, Siswanto. 1997. *Manajemen Terapan Bank*. Jakarta ; Pustaka Binaman Pressindos

Suyatno, Thomas (dkk). 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sastradipoetra, Komarudin. 2008. *Manajemen Marketing*. Bandung : Kappa Sigma

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis*, cetakan ke 12, Bandung: Alfabeta

Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan

CURRICULUM VITAE

- Nama : Ely Cintana Dewi
- Nomor Induk Mahasiswa : 105030207111068
- Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 27 Mei 1992
- Pendidikan : 1. SDN Wandanpuro 1 Bululawang Tamat Tahun 2004
2. SMPN 01 Buluwang Tamat Tahun 2007
3. SMAN 01 Gondanglegi Tamat Tahun 2010
- Pekerjaan : -
- Pendidikan Non Formal : 1. Desktop Training (DAT)
2. Kuliah Tamu Crazypreneur (HIMABIS)

